



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BANJARNEGARA**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. A. YANI NOMOR 16 TELP. (0286) 591043
BANJARNEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LKJiP ini berisi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Laporan ini juga mencakup evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama periode pelaksanaan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini, terutama kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, mitra kerja, serta seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Banjarnegara, Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banjarnegara



BARIJADI DJUMPAEDO, S.Sos

NIP: 19680105 199803 1 006



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam mencapai tujuan Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026. Dalam Sasaran tersebut tertuang 2 (dua) Tujuan, 6 (enam) Sasaran dan 7 (tujuh) Indikator kinerja yang dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 meliputi :

1. Indeks SPBE dengan target 3,30 terealisasi 3,72 sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 112,73%
2. Indeks Pembangunan Statistik Sektorial dengan target 2,10 terealisasi 2,98 sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 141,90%
3. Jumlah Aplikasi yang diassesment Indeks KAMI dengan target 1 aplikasi terealisasi 1 aplikasi sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 100%
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan target 78 terealisasi 89,56 sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 114,82%
5. Persentase Aduan yang tertangani dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 100%
6. Nilai SAKIP dengan target 69,41 terealisasi 72,10 sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 103,83%
7. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 84,40 terealisasi 84,50 sehingga capaian pada indikator sasaran adalah 100,12%

Berdasarkan analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) sasaran indikator kinerja, seluruhnya tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



BARIJADI DJUMPAEDO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19680105 199803 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB	I. PENDAHULUAN	
	A. Gambaran Umum	1
	B. Gambaran Organisasi	1
	C. Kinerja Pelayanan	3
	D. Isu Strategis	7
BAB	II. PERENCANAAN KINERJA	
	A. Perencanaan Strategis	12
	B. Indikator Kinerja Utama	13
	C. Perjanjian Kinerja	16
BAB	III. AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	21
	1. Sasaran 1	25
	2. Sasaran 2	31
	3. Sasaran 3	37
	4. Sasaran 4	42
	5. Sasaran 5	46
	6. Sasaran 6	53
	B. Realisasi Anggaran	57
	C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	62
	D. Penghargaan	69
BAB	IV. PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Progres Penyelesaian Isu Strategis	72
	C. Kebijakan Capaian Kinerja Mendatang	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1	<i>Pegawai berdasarkan jenis formasi</i> 3
Tabel 1. 2	<i>Pegawai berdasarkan Pendidikan</i> 3
Tabel 1. 3	<i>Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Tahun 2023 – 2024</i> 4
Tabel 1. 4	<i>Reviu Anggaran dan realisasi Tahun 2023 – 2024</i> 5
Tabel 2. 1	<i>Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika</i> 13
Tabel 2. 2	<i>Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja</i> 16
Tabel 2. 3	<i>Indikator Sasaran Strategis Eselon II</i> 17
Tabel 2. 4	<i>Pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2024</i> 18
Tabel 3. 1	<i>Skala Nilai Perangkat Kinerja</i> 21
Tabel 3. 2	<i>Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan program per tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024</i> 21
Tabel 3. 3	<i>Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024</i> 22
Tabel 3. 4	<i>Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024</i> 22
Tabel 3. 5	<i>Skala Nilai Perangkat Kinerja pada Indikator Kinerja</i> 23
Tabel 3. 6	<i>Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 - 2024</i> 23
Tabel 3. 7	<i>Domain penilaian SPBE Tahun 2024</i> 26
Tabel 3. 8	<i>Capaian Target dan Realisasi Sasaran 1 Tahun 2024</i> 26
Tabel 3. 9	<i>Perbandingan Capaian Penilaian SPBE Tahun 2022 -2024</i> 27
Tabel 3. 10	<i>Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Akhir Renstra 2026</i> 28
Tabel 3. 11	<i>Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1</i> 30
Tabel 3. 12	<i>Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024</i> 31
Tabel 3. 13	<i>Pengaduan tahun 2024</i> 33
Tabel 3. 14	<i>Capaian Target dan Realisasi Sasaran 2 Tahun 2024</i> 33
Tabel 3. 15	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 -2024</i> 34
Tabel 3. 16	<i>Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Target Akhir Renstra 2026</i> 34
Tabel 3. 17	<i>Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2</i> 37
Tabel 3. 18	<i>Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024</i> 37
Tabel 3. 19	<i>Capaian Target dan Realisasi Sasaran 3 Tahun 2024</i> 37
Tabel 3. 20	<i>Hasil Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain</i> 38
Tabel 3. 21	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022 -2024</i> 39

Tabel 3. 22	<i>Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Akhir Renstra 2026</i>	39
Tabel 3. 23	<i>Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 3</i>	41
Tabel 3. 24	<i>Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024</i>	42
Tabel 3. 25	<i>Capaian Target dan Realisasi Sasaran 4 Tahun 2024</i>	43
Tabel 3. 26	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2022 -2024</i>	44
Tabel 3. 27	<i>Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Target Akhir Renstra 2026</i>	45
Tabel 3. 28	<i>Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 4</i>	46
Tabel 3. 29	<i>Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024</i>	46
Tabel 3. 30	<i>Unsur Pelayanan SKM Sasaran 5 Tahun 2024</i>	47
Tabel 3. 31	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2022 -2024</i>	48
Tabel 3. 32	<i>Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Target Akhir Renstra 2026</i>	50
Tabel 3. 33	<i>Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 5</i>	52
Tabel 3. 34	Komponen penilaian Manajemen Kinerja	53
Tabel 3. 35	<i>Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2024</i>	53
Tabel 3. 36	<i>Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2022 -2024</i>	54
Tabel 3. 37	<i>Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 6 dengan Target Akhir Renstra 2026</i>	54
Tabel 3. 38	<i>Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 6</i>	56
Tabel 3. 39	<i>Pendapatan Dinkominfo Tahun 2024</i>	57
Tabel 3. 40	<i>Realisasi Belanja Dinkominfo tahun 2024</i>	58
Tabel 3. 41	<i>Realisasi Belanja Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota Tahun 2024</i>	58
Tabel 3. 42	<i>Realisasi Belanja Program Informasi dan Komunikasi Publik</i>	59
Tabel 3. 43	<i>Realisasi Belanja Program Aplikasi Informatika</i>	60
Tabel 3. 44	<i>Realisasi Belanja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>	61
Tabel 3. 45	<i>Realisasi Belanja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</i>	61
Tabel 3. 46	<i>Analisis Efisiensi Sumber Daya Sasaran 1</i>	62
Tabel 3. 47	<i>Analisis Efisiensi Sumber Daya Sasaran 2</i>	63
Tabel 3. 48	<i>Analisis Efisiensi Sumber Daya Sasaran 3</i>	64
Tabel 3. 49	<i>Analisis Efisiensi Sumber Daya Sasaran 4</i>	65
Tabel 3. 50	<i>Analisis Efisiensi Sumber Daya Sasaran 5</i>	66
Tabel 3. 51	<i>Analisis Efisiensi Sumber Daya Sasaran 6</i>	68
Tabel 3. 52	<i>Penghargaan tingkat Nasional tahun 2024</i>	69

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1. 1	Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara	10
Gambar 3. 1	Indeks SPBE	27
Gambar 3.2	Dokumentasi monitoring Menara Tahun 2024	30
Gambar 3.3	Penyerahan KIP Award dalam pelaksanaan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	33
Gambar 3.4	Penilaian Indeks KAMI	44
Gambar 3.5	Penyerahan penghargaan Peringkat ke 3 dalam penilaian pengawasan kearsipan Internal tahun 2024	49
Gambar 3.6	Lokasi Dinas Komunikasi dan Informatika menempati Gedung SETDA Kabupaten Banjarnegara Lantai 2	50
Gambar 3.7	Pelaksanaan Pengukuran kinerja E-SAKIP	57
Gambar 3.8	Penyerahan Penghargaan Indeks Statistik Sektoral tahun 2024	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1	Perjanjian Kinerja Perubahan 2024
Lampiran 1. 2	Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
Lampiran 1. 3	RKT 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang akuntabel, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun. LKJiP merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran serta evaluasi atas capaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui LKJiP ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dapat mengetahui capaian kinerja yang telah diraih, tantangan yang dihadapi, serta strategi perbaikan yang akan diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banjarnegara.

B. Gambaran Organisasi

Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

tergambarkan dalam Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Banjarnegara, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:
 - a) Sub Koordinator Pengelolaan Informasi; dan
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Komunikasi.
- 4) Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri atas :
 - a) Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur; dan
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi
- 5) Bidang statistik dan Persandian terdiri atas
 - a) Seksi Statistik; dan
 - b) Seksi Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara pada 31 Desember Tahun 2024 sumber daya aparatur yang ada pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan Jenis Formasi

Formasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
PNS	16	13	29	58%
PPPK	4	1	5	10%
PTT	1	-	1	2%
THL	4	1	5	10%
Tenaga Kegiatan	6	4	10	20%
Jumlah	31	19	50	100%

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika,2024

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika hingga 31 Desember 2024 sejumlah 50 orang, terdiri dari 19 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau sekitar 38 persen dan 31 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 62 persen dengan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
S2	2	2	4	8%
S1/DIV	10	9	19	38%
D.III	6	4	10	20%
SMA / SMK	13	4	17	34%
Jumlah	31	19	50	100%

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

C. Kinerja Pelayanan

Gambaran Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informantika selama 2 (dua) tahun periode RENSTRA 2023-2026 dan reviu pencapaian realisasi keuangan 2 tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tabel 1.3 dan Tabel. 1.4 sebagai berikut :



Tabel. 1.3 Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo tahun 2023 - 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				2023	2024
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks SPBE	3,30	3,29	3,72
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,10	2,10	2,98
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE	Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI	1 aplikasi	(belum ditetapkan sebagai target pada tahun 2023, perubahan dilaksanakan setelah penyelarasan)	1 aplikasi
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP OPD	B (69,41)	B (69,40)	BB (72,10)
II	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik				
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Nilai keterbukaan Informasi Publik 2. Persentase Aduan yang tertangani	78 100%	(belum ditetapkan sebagai target pada tahun 2023, perubahan dilaksanakan setelah penyelarasan)	89,56 100%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,4	84,4	84,5

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan tabel diatas pada indikator sasaran Nilai SAKIP yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan target 69,41 terealisasi 72,10 dengan demikian realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Sesuai LHE AKIP Tahun 2024 dari Inspektorat Nomor : 700/74/LHE/2024 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Tanggal 25 Juni 2024 terealisasi 72,10 berdasarkan hal tersebut secara perhitungan target kinerja telah tercapai. Review Anggaran dan Realisasi tahun 2023-2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dijabarkan pada tabel 1.4 sebagai berikut :



Tabel 1. 4 Review Anggaran dan Realisasi Tahun 2023-2024

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Anggaran 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.820.326.498	4.590.135.019	95,22	4.641.508.992
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.590.000	15.454.080	95,22	12.821.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.190.000	7.102.960	98,79	7.895.950
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.400.000	8.351.120	99,42	4.925.250
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.929.394.198	3.807.035.560	98,43	3.819.708.666
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.884.499.198	3.762.140.560	96,85	3.727.708.666
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.895.000	44.895.000	100	92.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.499.100	359.707.002	92,58	266.779.036
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.636.000	96,36	8.884.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	392.179.100	331.351.002	84,49	227.894.636
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.320.000	18.720.000	96,89	30.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.490.400	117.650.000	99,29	206.380.000
Pengadaan mebel	(tidak ada pagu anggaran pada tahun 2024)			32.630.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.490.400	117.650.000	99,29	173.750.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.410.000	204.255.377	82,70	249.430.990
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	46.471.282	77,45	46.656.981
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.410.000	157.794.095	87,95	202.774.009
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.942.800	86.033.000	90,53	86.389.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.037.500	45.282.000	88,72	54.931.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.966.800	21.301.000	85,32	14.853.100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.938.500	19.450.000	97,55	16.605.000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.134.330.000	1.115.606.785	98,35	1.143.462.421
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1.134.330.000	1.115.606.785	98,35	1.143.462.421

Kabupaten/Kota				
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12.000.000	10.663.000	88,86	16.958.900
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	224.760.000	223.141.000	99,28	248.967.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	152.800.000	146.207.459	95,69	194.912.529
Pelayanan Informasi Publik	96.700.000	87.927.168	90,93	8.701.000
Layanan Hubungan Media	400.320.000	399.918.258	99,90	491.001.992
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.000.000	99.999.900	99,99	67.496.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	147.750.000	147.750.000	100	115.425.000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.170.865.200	2.053.783.022	94,61	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	1.239.330.000	1.190.358.252	96,05	1.224.724.887
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.239.330.000	1.190.358.252	96,05	1.224.724.887
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	931.535.200	863.424.770	94,19	779.435.366
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.077.100	93,85	7.211.090
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	(tidak ada pagu anggaran pada tahun 2024)			260.752.460
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	663.745.200	601.282.670	90,59	121.977.660
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	252.790.000	248.065.000	98,13	389.494.156
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	94.100.000	91.049.000	96,76	
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.100.000	91.049.000	96,76	68.324.200
Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	94.100.000	91.049.000	96,76	42.050.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	(tidak ada pagu anggaran pada tahun 2024)			11.462.200,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	(tidak ada pagu anggaran pada tahun 2024)			15.409.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	132.110.000	128.012.830	96,90	

PENGAMANAN INFORMASI				
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.110.000	128.012.830	96,90	69.022.000
Sub Keg. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	132.110.000	128.012.830	96,90	62.983.450
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(tidak ada pagu anggaran pada tahun 2024)			6.038.550
	8.351.731.689	7.978.586.656	95,53	7.926.477.866

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika,2024

D. Isu Strategis

Lingkungan strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 2 (dua) lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan strategis tersebut perlu diantisipasi agar tidak mempengaruhi kinerja lembaga, baik yang bersifat positif untuk terus dikembangkan dan yang bersifat negatif untuk dihindari. Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang menjadi isu permasalahan yang perlu diatasi.

Mendasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusab persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah guna mendukung Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut isu permasalahan yang dihadapi :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Sistem Belum optimalnya pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* sangat penting di era Informatika, khususnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi masih berada pada angka 8,5%.
- b. Masih rendahnya penetrasi layanan public secara Informatika yang diakses oleh masyarakat.
- c. Masih rendahnya Indeks SPBE yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi.



- d. Dokumen kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi SPBE masih ada yang belum tersusun. Dalam rangka implementasi SPBE dari 6 dokumen arsitektur SPBE baru 2 dokumen yang tersusun, yaitu dokumen Proses Bisnis dan Arsitektur Infrastruktur. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk SPBE dan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020 tentang SPBE diperlukan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun non publik. Untuk itu diperlukan pengintegrasian SIM/aplikasi yang terkendala belum adanya regulasi penyusunan dan pengembangan SIM yang sesuai standar
- e. Belum terbangunnya fasilitas jaringan internet desa WAN/LAN ke jaringan Banjarnegara Online.
- f. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
- g. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.
- h. Keterbukaan informasi publik harus ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kapasitas SDM yang menangani pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, pelayanan informasi (PPID) dan pengaduan masyarakat.
- i. Diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk membuat konten informasi.
- j. Data center yang belum dilakukan pembaharuan sejak diadakan, belum memenuhi standar nasional.
- k. Belum optimalnya pemerdayaan komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi (KIM dan FK METRA mati suri)
- l. Perlunya peninjauan kembali Peraturan Bupati yang mengatur standarisasi biaya iklan di LPPL Radio Suara Banjarnegara
- m. Belum optimanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja OPD.
 - a. Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan laporan capaian ikhtisar kinerja (SAKIP)
 - b. Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, pegawai belum sepenuhnya memahami dan

peduli, serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.

- c. Pengukuran Kinerja belum dapat dijadikan sebagai penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- d. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- e. Dokumen Laporan Kinerja belum di reviu secara optimal pada setiap jenjangnya.
- f. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.
- n. Masih kurangnya penyediaan wifi pada fasilitas umum.
- o. Belum optimalnya pengelolaan website di Dinas Komunikasi dan Informatika
- p. Personil Fokohumas di tiap OPD belum aktif dalam mengirimkan berita kegiatan OPD masing-masing untuk ditayangkan di website banjarnegarakab.go.id

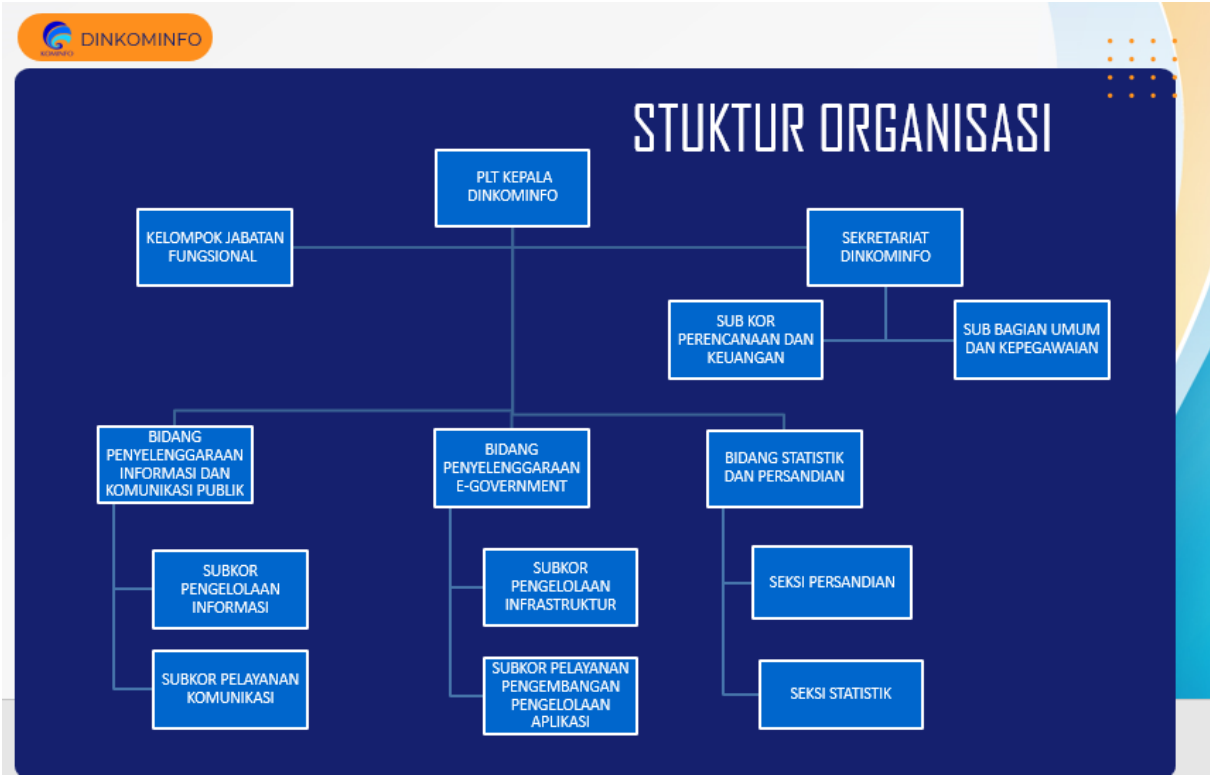
2. Urusan Statistik

- a. Kualitas ketersediaan data statistik sektoral belum memenuhi standar,
- b. Belum tersediakan data dan informasi yang lengkap sesuai dengan data prioritas untuk digunakan sebagai penunjang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah
- c. Belum optimalnya pengelolaan Satu Data Indonesia Daerah,
- d. Belum dilakukan update data dalam portal open data secara periodik dan berkelanjutan
- e. Belum tercukupinya kebutuhan tenaga ahli di bidang statistisi, dan belum tersedianya sumberdaya pengelola data dan informasi yang memiliki kompetensi berbasis statistik untuk pengelola data di tiap OPD terkait
- f. Guna mendukung Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Daerah diperlukan kerjasama yang baik dari Pembina Data (BPS), Sekretaris Satu Data (Baperlitbang), Wali Data (Dinkominfo) dan produsen data di masing-masing OPD dalam menyediakan data yang berkualitas dan siap berbagi pakai.

3. **Urusan Persandian**

- a. Masih belum optimalnya pengelolaan tingkat keamanan informasi pemerintah.
- b. Membutuhkan tenaga ahli di bidang pengelolaan persandian, keamanan informasi berbasis digital dan telekomunikasi yaitu sandiman, manggala persandian dan pranata komputer untuk penguatan tim CISRT
- c. Keamanan informasi maupun aplikasi dari serangan cyber harus ditingkatkan dengan membangun Sistem Keamanan Informasi.
- d. Diperlukan lebih banyak sosialisasi tentang pentingnya keamanan informasi
- e. Perlunya peningkatan kompetensi SDM yang menangani pengelolaan persandian.

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara



Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika,2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2023 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 yang memiliki visi Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian. Dalam tahap keempat ini pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Banjarnegara dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara, selaras dengan RPJM Nasional 2023-2026 dan RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2025–2045. Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang memiliki harga diri lebih, saat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 khususnya Misi 3 : *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab*. Maka diperlukan tujuan dan sasaran yang tepat dari perangkat daerah.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja, Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan OPD yang merupakan Sasaran Pemerintah Kabupaten, dan menetapkan sasaran strategis, program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Tujuan OPD yang pertama adalah "Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah". Tujuan ini didukung oleh 4 (empat) Sasaran Strategis berikut :
 - a. Sasaran pertama "Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi", sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan 2 (dua) kegiatan, yakni Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah dan Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sasaran Kedua "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik", sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Sasaran Ketiga "Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung SPBE", sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan 1(satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Sasaran Keempat "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika", sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Tujuan OPD yang kedua adalah "Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik" didukung dengan 2(dua) sasaran strategis yaitu :
- a. Sasaran Kelima "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik", sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan 1 (satu) kegiatan, yakni Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sasaran Keenam "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika", sasaran ini akan dicapai dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan penyelarasan maka ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATU AN	KETERANGAN			SUMBER DATA
1	2	3	4	5			6
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
1.	Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	1 . Indeks SPBE	Nilai	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui : Nilai SPBE Kabupaten Banjarnegara	Kemenpan RB
				Formulasi Pengukuran	:	Nilai indeks SPBE yang dirilis oleh KEMENPANRB (Minimal Nilai 2,60 dengan predikat cukup, target Pemkab 3,30 dengan predikat Baik)	
				Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif	
				PD Penanggung Jawab	:	DINKOMINFO	
				Sumber Data	:	DINKOMINFO	



2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui: Nilai Keterbukaan Informasi Publik		Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
					Formulasi Pengukuran	:	Nilai yang dirilis oleh Komisi Informasi Jateng (Target Nilai 78 dengan kategori menuju informatif)		
					Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif		
					PD Penanggung Jawab	:	DINKOMINFO		
					Sumber Data	:	DINKOMINFO		
		2	Persentase aduan yang tertangani	%	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui: Persentase aduan yang tertangani dari jumlah aduan yang masuk melalui kanal aduan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (SP4N Lapor, LaporGub, LaporBup, Banjarnegara Gateway)		Dinkominfo (self Assesment)
					Formulasi Pengukuran	:	Jumlah aduan yang tertangani	X	
							Jumlah aduan yang masuk	100	
					Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif		
					PD Penanggung Jawab	:	DINKOMINFO		
					Sumber Data	:	DINKOMINFO		
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	1	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Nilai	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui: Nilai indeks pembangunan statistik sektoral		
					Formulasi Pengukuran	:	Nilai indeks statistik sektoral yang dirilis oleh BPS (Minimal Nilai 2,60 dengan predikat cukup. Target Pemkab tahun 2024 adalah 2,10 dengan predikat cukup, sedangkan nilai indeks pembangunan statistik sektoral tahun 2023 atas penilaian EPSS tahun 2022 adalah 2,03 dengan predikat cukup)		
					Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif		
					PD Penanggung Jawab	:	DINKOMINFO		
					Sumber Data	:	DINKOMINFO, BPS		

4.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	1	Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI	Unit	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui OPD yang telah melakukan keamanan aplikasinya		Dinkominfo (self Assesment)
					Formulasi Pengukuran	:	Jumlah sistem elektronik yang dilakukan assesment indeks KAMI. (Target prosentase aplikasi yang di nilai indeks KAMI diperoleh dari nilai indeks KAMI : (0-645)/(645 (nilai maksimal indeks KAMI) x 100 %.Target tahun 2024 dengan skor indeks KAMI 175 atau 27,13 % maka OPD yang menjadi target 1 sistem elektronik.		
					Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif		
					PD Penanggung Jawab	:	DINKOMINFO		
					Sumber Data	:	DINKOMINFO		
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarakat		Dinkominfo
					Formulasi Pengukuran	:	Total nilai persepsi per unsur	X 100	
							Total unsur yang terisi		
					Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif		
					PD Penanggung Jawab	:	DINKOMINFO		
Sumber Data	:	DINKOMINFO							
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	Alasan Pemilihan Indikator	:	Indikator ini dipilih untuk mengetahui nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Inspektorat
					Formulasi Pengukuran	:	Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara		
					Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif		
					PD Penanggung Jawab	:	DINKOMINFO		
					Sumber Data	:	DINKOMINFO		

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

C. PERJANJIAN KINERJA

Ringkasan/lkhtisar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Murni maupun Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, memuat informasi semua komponen dalam mencapai sasaran sesuai indikator kinerja yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Guna mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 khususnya Misi 3 : *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab.* Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 2(dua) tujuan utama OPD yang pertama yaitu “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan yang kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public ”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas/Eselon II, dengan 6 (enam) sasaran strategis yang juga telah ditetapkan, yaitu (dalam tabel 2.2):

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
I	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks SPBE
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE	Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP OPD
II	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public	
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan Informasi Publik Persentase Aduan yang tertangani
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

- Sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan :
- 1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan Indikator Kinerja : “Nilai Indeks SPBE” dengan target 3,30 predikat;
 - 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan 2 (dua) indikator kinerja: “Nilai Keterbukaan Informasi Publik” dengan target nilai 78, dan Persentase Aduan yang tertangani”, dengan target 100%;

3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Data dan Statistik dengan indikator : “Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral”, dengan target 2,10;
4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE, dengan indikator “Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI” dengan target 1 aplikasi .
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Indikator : “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat”, dengan target nilai sebesar 84,40;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan indikator : “Nilai SAKIP OPD” dengan target nilai : B (69,41).

Sedangkan rincian target Penetapan Kinerja dari masing-masing indikator kinerja Dinas (Eselon II) dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 3 .Target Indikator Sasaran Strategis Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks SPBE	3,30
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,10
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE	Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI	1 aplikasi
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP OPD	B (69,41)
II	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public		
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Nilai keterbukaan Informasi Publik 2. Persentase Aduan yang tertangani	78 100%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,4

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banjarnegara menetapkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja pada awal Tahun 2024, dengan Alokasi Anggaran murni sebesar **Rp. 8.036.858.792,-** (delapan milyar tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh

ratus sembilan puluh dua rupiah). Setelah Refocussing Anggaran Perubahan bertambah sebesar **Rp.314.872.906,-** (tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga setelah perubahan total anggaran menjadi sebesar **Rp.8.351.731.698,-** (*delapan milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

Demikian ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, adapun Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terlampir (tabel 2.4) sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.820.326.498	4.590.135.019	95,22
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.590.000	15.454.080	95,22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.190.000	7.102.960	98,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.400.000	8.351.120	99,42
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.929.394.198	3.807.035.560	98,43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.884.499.198	3.762.140.560	96,85
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.895.000	44.895.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.499.100	359.707.002	92,58
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.636.000	96,36
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	392.179.100	331.351.002	84,49
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.320.000	18.720.000	96,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.490.400	117.650.000	99,29
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.490.400	117.650.000	99,29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.410.000	204.255.377	82,70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	46.471.282	77,45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.410.000	157.794.095	87,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.942.800	86.033.000	90,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.037.500	45.282.000	88,72
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.966.800	21.301.000	85,32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.938.500	19.450.000	97,55
PROGRAM INFORMASI DAN	1.134.330.000	1.115.606.785	98,35

KOMUNIKASI PUBLIK			
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.134.330.000	1.115.606.785	98,35
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12.000.000	10.663.000	88,86
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	224.760.000	223.141.000	99,28
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	152.800.000	146.207.459	95,69
Pelayanan Informasi Publik	96.700.000	87.927.168	90,93
Layanan Hubungan Media	400.320.000	399.918.258	99,90
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.000.000	99.999.900	99,99
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	147.750.000	147.750.000	100
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.170.865.200	2.053.783.022	94,61
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.239.330.000	1.190.358.252	96,05
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.239.330.000	1.190.358.252	96,05
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	931.535.200	863.424.770	94,19
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.077.100	93,85
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	663.745.200	601.282.670	90,59
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	252.790.000	248.065.000	98,13
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	94.100.000	91.049.000	96,76
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.100.000	91.049.000	96,76
Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	94.100.000	91.049.000	96,76
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	132.110.000	128.012.830	96,90
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.110.000	128.012.830	96,90
Sub Keg. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	132.110.000	128.012.830	96,90
	8.351.731.689	7.978.586.656	95,53

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi perangkat daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada masyarakat. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RPD 2023-2026.

Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2024, menunjukkan bahwa 6 (enam) sasaran strategis tersebut telah tercapai memenuhi target. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dilakukan dengan cara menyajikan rincian hasil pengukuran kinerja Organisasi dengan menganalisis tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran dengan Skala Ordinal, yaitu :

Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Keterangan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat rendah

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai rata-rata setiap kelompok sasaran dibagi jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut:

Capaian sasaran =
$$\frac{\text{Jumlah Indikator} \times \text{Rata – rata Capaian Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$

Rata-rata capaian kinerja tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 sebesar 114,63% dengan rincian 2 (dua) indikator kinerja tujuan tercapai dengan kategori sangat tinggi. Adapun Rata-rata capaian indikator Sasaran pada tahun 2024 sebesar 110,49% dengan rincian 7 (tujuh) indikator dengan kriteria capaian sangat tinggi

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Program Per Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

No	Tujuan	Jumlah Indikator		Rata-Rata Capaian			
		Sasa ran	Prog ram	Sasaran	Ket	Program	Ket
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	4	4	114,63	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public	3	2	104,98	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Indikator kinerja Tujuan tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel. 3.3 sebagai berikut :



Tabel. 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan tahun 2024

No	Tujuan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Kinerja
	Tujuan 1					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah					
1.	Nilai Sakip	Nilai	B	B	100%	Sangat tinggi
	Opini bpk	Nilai	WTP	WTP	100%	Sangat tinggi
	Tujuan 2					
2.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public					
	Nilai SKM	Nilai	84,4	84,5	100,12%	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian					100,04%	Sangat tinggi

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka capaian rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 100,04% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Untuk capaian kinerja sasaran ditunjukkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel. 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran tahun 2024

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Kinerja
	Sasaran 1					
	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi					
1	Nilai Indeks SPBE	Nilai	3,30	3,72	112,73%	Sangat tinggi
	Sasaran 2					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik					
2	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Nilai	2,10	2,98	141,90%	Sangat tinggi
	Sasaran 3					
	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE					
3	Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI	aplikasi	1	1	100%	Sangat tinggi
	Sasaran 4					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika					
4	Nilai SAKIP OPD	Nilai	69,41	72,10	103,87%	Sangat tinggi
	Sasaran 5					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik					

5	Nilai keterbukaan Informasi Publik	Nilai	2,10	2,98	141,90%	Sangat tinggi
6	Persentase Aduan yang tertangani	Persen	100	100	100%	Sangat tinggi
Sasaran 6						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika						
7	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,4	84,5	100,12%	Sangat tinggi
Rata-rata Capaian					100,49%	Sangat tinggi

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka capaian rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 100,49% dengan predikat kinerja sangat tinggi, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel. 3.5 Skala Nilai pada Indikator Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian Predikat Kerja	Indikator Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	7
76% ≤ 90%	Tinggi	-
66% ≤ 75%	Sedang	-
51% ≤ 65%	Rendah	-
≤ 50%	Sangat rendah	-
JUMLAH IKU		7

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka terdapat 7 indikator kinerja dengan predikat kinerja sangat tinggi (100%).

Berikut review perbandingan capaian indikator Kinerja sasaran tahun 2023 dan tahun 2024, dalam tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel. 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				2023	2024
	Tujuan 1				
I	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.Nilai Indeks SPBE	3,30	3,29	3,72
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	2.Nilai Indeks Pembangunan	2,10	2,10	2,98



	Data dan Statistik	Statistik Sektoral			
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE	3.Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI	1 aplikasi	(belum ditetapkan sebagai target pada tahun 2023, perubahan dilaksanakan setelah penyelarasan)	1 aplikasi
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	4.Nilai SAKIP OPD	B (69,41)	B (69,40)	BB (72,10)
Tujuan 2					
II	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public				
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.Nilai keterbukaan Informasi Publik 6.Persentase Aduan yang tertangani	78 100%	(belum ditetapkan sebagai target pada tahun 2023, perubahan dilaksanakan setelah penyelarasan)	89,56 100%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	7.Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,40	84,40	84,50

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang mendukung capaian kinerja pada 6 (enam) sasaran, dimana terdapat 3(tiga) indikator yang berubah pada saat penyelarasan. Berikut ini dinarasikan capaian kinerja atas 6 (enam) sasaran yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi*, dengan Indikator Kinerja : Nilai Indeks SPBE, dengan target nilai 3,30. Melalui evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PAN RB tahun 2024 diperoleh nilai 3,72 sehingga capaian kinerjanya 112,73% ;
2. Sasaran strategis yang kedua yaitu : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan 2 (dua) indikator kinerja: “Nilai keterbukaan Informasi Publik” dengan target nilai 78 terealisasi sasaran sebesar 89,56 sehingga capaian kinerjanya 114,82%, dan “Persentase Aduan yang tertangani”, dengan target 100%; terealisasi sasaran sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
3. Sasaran strategis yang ketiga yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Data dan Statistik, dengan Indikator Kinerja : Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral”, dengan target 2,10; Tahun 2024 terealisasi sasaran sebesar 2,98 sehingga capaian kinerjanya 141,90%



4. Sasaran strategis yang keempat yaitu : Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE, dengan indikator “Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI” dengan target 1 aplikasi terealisasi 1 aplikasi sehingga capaian kinerjanya 100%.
5. Sasaran strategis yang kelima yaitu : *Meningkatnya kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika*, dengan Indikator Kinerja : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target nilai 84,40 tercapai nilai 84,50 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,12%;
6. Untuk sasaran strategis yang ke enam yaitu : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika*, dengan Indikator Kinerja : Nilai SAKIP OPD dengan target predikat kategori B (69,41). Target tersebut di tahun 2024 bisa tercapai dengan nilai di 72,10 (BB), sehingga capaian kinerja yang bisa dicapai adalah 103,87%.

Kemudian dari uraian diatas, secara umum menunjukkan hasil yang baik, kemudian secara singkat dapat dijelaskan secara terperinci capaian kinerja tiap-tiap indikator sasaran, sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
-------------	---

Sasaran 1 : *"Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi"*, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : *Nilai Indeks SPBE*, yang pada tahun 2024 ditargetkan nilai 3,30. Indikator ini dipilih untuk mengukur sasaran 1 sesuai hasil review terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Alasan pemilihan indikator ini karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi untuk memberikan layanan kepada pengguna diantaranya pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan evaluasi setiap tahun baik secara mandiri maupun oleh Menpan RB. Pada tahun 2024 melalui penilaian dari Menpan RB diperoleh nilai Indeks SPBE 3,72 sehingga memenuhi bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu 0,42.

Penilaian SPBE dilakukan terhadap 4 domain yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Nilai dari masing-masing domain adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7. Domain Penilaian SPBE Tahun 2024

No	Domain	Indeks
1	Domain Kebijakan SPBE	4,90
2	Domain Tata Kelola SPBE	3,40
3	Domain Manajemen SPBE	1,64
4	Domain Layanan SPBE	4,32
	Indeks SPBE	3,72

Sumber data : Kemenpan RB

Nilai yang dicapai pada tahun 2024 ini menempatkan Banjarnegara termasuk pada kategori sangat baik. Realisasi Nilai Indeks SPBE sudah memenuhi bahkan melampaui dari target yang sudah ditentukan yaitu 0,42. Namun pada pelaksanaan manajemen SPBE nilainya masih rendah disebabkan kesulitan dalam penyusunan dokumen, hal ini dikarenakan belum ada peraturan menteri berupa juknis atas pelaksanaan. Pelaksanaan audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan belum dilaksanakan karena perlu koordinasi lebih lanjut.

Hal yang sudah dicapai berkaitan SPBE di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah penyusunan Masterplan SPBE, Perbup Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE, Dokumen arsitektur Proses Bisnis dan Dokumen Arsitektur Infrastruktur. Kemudian capaian kinerja di analisis dengan :

1. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 3. 8 Capaian Target dan Realisasi Sasaran 1Tahun 2024

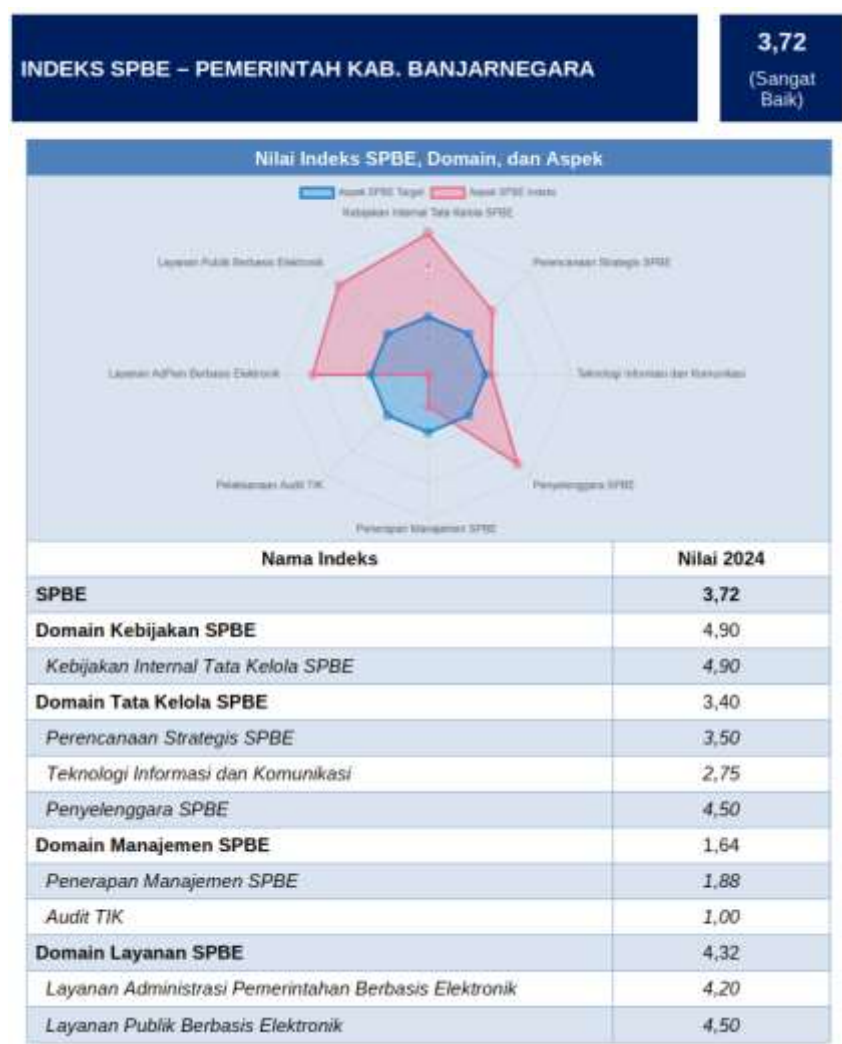
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Nilai Indeks SPBE	3,30	3,72	112,73

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan tabel dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 mencapai 112,73 % dengan predikat sangat tinggi.



Gambar. 3. 1 Indeks SPBE



Sumber data : Kemenpan RB , 2024

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Apabila realisasi kinerja dan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel. 3.9 Perbandingan Capaian Penilaian SPBE Tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai Indeks SPBE	2,86	104	3,29	131,6	3,72	112,73

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Capaian Nilai Indeks SPBE pada 3 (tiga) tahun terakhir sejak 2022 hingga 2024 trennya mengalami kenaikan yang signifikan.



3. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA OPD, DAPAT DIILUSTRASIKAN DALAM TABEL BERIKUT :**

Tabel. 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Indikator kinerja	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	%
1	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	3,40	3,72	109,41

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 dibanding Target adalah 109,41 sehingga sudah bisa melampaui target akhir renstra yaitu 3,40. Artinya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sudah cukup baik dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Namun masih perlu ada upaya yang sistematis agar SPBE di Kabupaten Banjarnegara mencapai tahapan dengan kategori yang sangat baik.

4. **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN;**

1. Terdapat payung hukum pelaksanaan SPBE Nasional yaitu Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Terdapat payung hukum pelaksanaan SPBE di Banjarnegara yaitu Perbup No. 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE,
3. Telah disusun Dokumen Arsitektur dan Masterplan SPBE sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPBE.
4. Koordinasi yang baik antara beberapa OPD yang menangani SPBE sesuai dengan bidang tugasnya (ada 24 OPD)
5. Munculya inovasi digitalisasi layanan kepada masyarakat baik yang diinisiasi pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.
6. Koordinasi yang baik antar OPD pengampu SPBE;
7. Sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pendampingan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan OPD se Kabupaten Banjaregara terkait kegiatan e-goverment yang dilaksanakan;



8. Pemenuhan kebutuhan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memadai sehingga mendukung terlaksananya kegiatan.

Namun demikian ternyata tetap saja terdapat Permasalahan dalam pencapaian indikator antara lain yaitu :

1. Upaya integrasi antara berbagai aplikasi masih terkendala, disebabkan belum semua aplikasi atau SIM dibangun sesuai standar.
2. Pusat Data Pemerintah (Data Center) yang belum memenuhi standar nasional.
3. Serangan siber pada website dan aplikasi pemerintah.
4. Peningkatan kompetensi SDM sesuai perkembangan Teknologi Informasi belum mencukupi.
5. Pelaksanaan manajemen SPBE nilainya masih rendah disebabkan kesulitan dalam penyusunan dokumen, hal ini dikarenakan belum ada peraturan menteri berupa juknis atas pelaksanaan

Adapun solusi dalam rangka mengatasi terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Menyusun regulasi yang mengatur pembangunan SIM/aplikasi yang sesuai standar, sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait yang masuk dalam Tim Koordinasi SPBE dalam rangka implementasi SPBE sesuai Masterplan SPBE.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi Dan Informatika.
4. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain diluar Pemda)
5. Dukungan Anggaran dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan dan layanan public berbasis elektronik.
6. Pembentukan tim untuk menangani serangan siber;
7. Peningkatan keamanan pada website dan aplikasi Pemda.
8. Mengikuti training peningkatan kapasitas SDM yang diselenggarakan oleh kementerian, atau lembaga lainnya.
9. Mengusulkan kegiatan peningkatan kapasitas SDM ke dalam dokumen penganggaran.

Gambar . 3. 2 Dokumentasi Monitoring Menara Tahun 2024



Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Gambar 3.2 merupakan dokumentasi dari monitoring menara tahun 2024. Monitoring menara ini bertujuan kontrol pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi dari aspek teknis, lingkungan dan kepentingan umum, terutama bagi menara yang sedang atau baru dibangun pada saat itu. Disamping itu monitoring juga melihat langsung apakah kondisi menara cukup layak dan tidak memiliki potensi gangguan terhadap beroperasinya menara tersebut.

5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA. (PADA INDIKATOR SASARAN).

Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dicapai melalui 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

Tabel. 3.11 Program dan Kegiatan penunjang Capaian Kinerja Sasaran 1

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			3.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik
			4.Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Adapun program/kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Program Aplikasi Informatika dan kegiatannya adalah kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 2 :	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
-------------	---

1. Sasaran 2 : ” *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik*”, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja : ”**Nilai keterbukaan Informasi Publik**” dan “**Persentase Aduan yang tertangani**”, dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3. 12 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	78	89,56
2	Persentase Aduan yang tertangani	100	100

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Untuk target indikator pada penyelarasan terdapat 2 (dua) indikator yang dilakukan penilaian atas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informasi publik yaitu mendukung keterbukaan informasi yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat atas kebijakan perangkat daerah. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan setiap satu tahun satu kali oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Dengan capain tersebut, membuktikan bahwa ketersediaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang actual atas kinerja perangkat daerah. Atas dasar tersebut, Kabupaten Banjarnegara mendapatkan predikat menuju informatif dan sudah cukup baik dengan predikat menuju informatif.

Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengajukan aduan atas kebijakan dan layanan public pemerintah melaui portal pengaduan masyarakat diantaranya SP4N Lapor, LaporGub, LaporBup, dan Banjarnegara Gateway di nomor 0812 2812 4447. Selain itu, layanan pengaduan juga bisa melalui media social resmi milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Media sosial yang

dapat diakses oleh masyarakat untuk penyampaian informasi yaitu, Instagram, Twitter, Website, Facebook, Tiktok baik milik Pemkab maupun Dinkominfo.

Tabel 3.13 Pengaduan Tahun 2024

Bulan		Jenis Kanal				
		SP4N Lapor	Lapor Bupati	Lapor Gubernur	Whatsapp	
					Non Infrastruktur	Infrastruktur
01.	Januari	7	2	13	63	0
02.	Februari	2	1	7	35	0
03.	Maret	2	0	8	25	1
04.	April	1	1	5	12	0
05.	Mei	1	2	5	22	2
06.	Juni	2	0	3	13	1
07.	Juli	2	0	6	15	0
08.	Agustus	2	0	5	18	0
09.	September	1	1	5	26	0
10.	Oktober	3	1	4	15	0
11.	November	0	2	0	30	1
12.	Desember	1	2	7	18	2
Total		24	12	68	292	7
Jumlah Aduan						403

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Persentase aduan dari masyarakat yang diterima telah diteruskan kepada OPD terkait. Adapun formulasi pengukurannya adalah sebagai berikut :

Jumlah Aduan dari Masyarakat selama tahun 2024

Jumlah Aduan yang tertangani selama tahun 2024

X 100%

403 Aduan

403 Aduan

X 100% = 100%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 pada Sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Target dan Realisasi Sasaran 2 tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Persentase Aduan yang tertangani	82	89,56	91,56%
		100%	100%	100%

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 pada indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dibanding Target adalah 78 dan capaian atas kinerja 89,56 dan sudah melampaui target akhir renstra 2026 yaitu 82.

Pada indikator Persentase Aduan yang tertangani sejumlah 403 juga diperoleh capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%, hal ini juga menandakan bahwa aduan dari masyarakat sudah tersampaikan kepada OPD terkait, harapannya aduan dapat segera ditindaklanjuti.

Gambar 3.3 Penyerahan KIP Award dalam pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024



Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR Dikarenakan Nilai Keterbukaan Informasi Publik dan Persentase aduan yang tertangani

merupakan hasil penyelarasan pada awal tahun 2024, sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	78	89,56
2	Persentase Aduan yang Tertangani	-	-	-	-	100	100

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2024, sudah dapat melampaui target.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA OPD

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran 2 dengan Target Akhir Renstra 2026

Indikator Kinerja		Target akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	%
1.	1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	82	89,56	109,22%
	2. Persentase Aduan yang tertangani	100%	100%	100%

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 dibanding Target adalah 109,22 sehingga sudah bisa melampaui target akhir renstra yaitu 82. Artinya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sudah cukup baik dalam pelayanan keterbukaan informasi publik. Namun masih perlu ada upaya yang sistematis agar Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Banjarnegara mencapai tahapan dengan kategori yang lebih baik. Pada indikator kedua, untuk persentase aduan target 100% terealisasi 100% maka indikator aduan dinilai sudah cukup baik.



4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

Pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Kendala-kendala ini perlu diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan layanan informasi publik berjalan optimal. Berikut adalah rincian kendala yang dihadapi:

A. Kendala Eksternal

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik: Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak mereka untuk mendapatkan informasi publik, sehingga tingkat partisipasi dalam menggunakan layanan PPID masih rendah.
2. Aksesibilitas Teknologi yang Belum Merata: Di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet menghambat masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis daring seperti aplikasi dan portal layanan.
3. Permintaan Informasi yang Tidak Sesuai Prosedur: Beberapa permohonan informasi diajukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga memerlukan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait prosedur yang benar.

B. Kendala Internal

1. Di beberapa OPD, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi publik menjadi kurang optimal.
2. Pemahaman terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik yang belum merata diimplementasikan di seluruh OPD.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola informasi dan dokumentasi di PPID Kabupaten Banjarnegara, terutama yang secara khusus menangani IT serta adanya dinamika organisasi dan perubahan posisi jabatan.
4. Peran PPID Pelaksana yang belum secara aktif melakukan update data pada menu PPID di website masing-masing OPD.

5. Salah satu kendala utama dalam pengelolaan pengaduan adalah lambatnya respon dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Respon yang lambat ini berdampak pada ketidakpuasan masyarakat, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta potensi tertundanya penyelesaian masalah yang diadukan.
6. Belum Ada PIC (Person In Charge) di Masing-Masing OPD

C. Solusi terhadap permasalahan :

1. Membuat panduan sederhana dalam bentuk infografis atau video tutorial tentang prosedur pengajuan informasi, yang dapat diakses secara offline maupun online.
2. Adanya unit khusus atau tenaga khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi di setiap OPD sehingga menjadikan layanan informasi publik menjadi lebih optimal.
3. Meningkatkan sinergitas antara PPID dan PPID Pelaksana dengan mengadakan rapat koordinasi maupun rapat konsolidasi sehingga semakin memperkuat kelembagaan PPID.
4. Melakukan pemantauan dan monev lokal untuk PPID Pelaksana.
5. Menyelenggarakan forum peningkatan kapasitas petugas pelayanan informasi untuk PPID dan PPID Pelaksana, sehingga pemahaman terhadap implementasi keterbukaan informasi di setiap OPD merata.
6. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik untuk mendukung pelayanan informasi publik bagi semua kalangan, terutama masyarakat berkebutuhan khusus.
7. Melakukan inovasi digital terkait layanan informasi publik.

5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dicapai melalui 1 (satu) program, 1 kegiatan dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

Tabel . 3. 17 Program dan Kegiatan penunjang Capaian Sasaran 2

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
			2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
			3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			4. Pelayanan Infomasi Publik
			5. Layanan Hubungan Media
			6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
			7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Sasaran 3 :	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik
-------------	--

Sasaran 3 : "*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik*", diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja : "**Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral**", dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel . 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,10	2,98

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Indikator *Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral* baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 setelah dilakukan penyelarasan, Indikator ini memberikan gambaran tentang Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 tahun 2024.

Adapun formulasi Penghitungan Indikator Sasaran diperoleh dari Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral atas penilaian Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No.B-563/01000/ES/2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.



Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 pada Sasaran 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Capaian Target dan Realisasi Sasaran 3 tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas pelayanan data dan statistik	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,10	2,98	141,90%

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Indikator Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, sehingga tidak bisa diperbandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

Hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistktik dan Nilai Indeks Domain Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel 3.20

Tabel 3. 20 Hasil Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Prinsip SDI	28 %	2,60	2,43	3,00
Kualitas Data	24 %	2,60	2,27	3,07
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	3,21
Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,70
Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,78
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,98

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2024



2. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

Dikarenakan indikator Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral ditetapkan sebagai indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, sehingga belum bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3. 21 Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 3 tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral					2,10	2,98

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2024, sudah memenuhi target.

3. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA OPD**

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Target Akhir Renstra 2026

Indikator Kinerja		Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	%
1.	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,30	2,98	129,57

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

4. **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Capaian kinerja yang sudah berhasil tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Proses Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi, Kinerja



Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat diukur melalui Kegiatan Reviu dan Evaluasi di setiap proses;

2. Penerapan pada Kualitas Data sudah memenuhi prosedur baku yang telah ditetapkan untuk seluruh produsen data, dan pada indikator tingkat kematangan akses media penyebarluasan data sudah dilakukan reviu dan evaluasi yang telah menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukan reviu dan evaluasi;
3. Penerapan Proses Bisnis Statistik telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, reviu dan evaluasi sudah dilakukan pada aspek desiminasi data;
4. Penerapan aspek pengorganisasian Statsistik terkait kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistic dan kolaborasi dengan Pembina Data telah dilakukan secara formal, dengan tingkat kematangan yang terkelola;
5. Penerapan aspek pemanfaatan data statistic dan pengelolaan kegiatan statistic sectoral sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, pada aspek pemanfaatan ini seluruh produsen data telah menggunakan data statsitik dasar yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan sudah melampirkan LKPJ yang diterbitkan oleh walidata (telah dilakukan oleh produsen data dan walidata), selain itu telah dilakukan melalui pelatihan atau bimtek statistic sectoral dan sosialisasi statistic melalui media masa.

PERMASALAHAN :

1. Seluruh prinsip satu data Indonesia daerah masih bersifat umum belum terperinci dan data statistic sectoral masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk perencanaan pembangunan
2. OPD belum memetakan data statistic sectoral yang sesuai dengan Data Prioritas, serta dalam pengumpulan data masih belum tepat waktu, dan data yang dilaporkan masih belum konsisten
3. Proses bisnis pengelolaan data statistic sectoral di masing masing OPD belum di laksanakan dari perencanaan data, pengumpulan data dan pemeriksaan data dan evaluasi data di masing masing OPD
4. Peningkatan kompetensi SDM Pengelola Data Statistik Sektoral di masing masing OPD masih sangat rendah, apalagi sering terjadinya pergantian personil pengelola data statistic sectoral, karena belum adanya ABK secara spesifik pada peta jabatan di masing masing OPD

5. Belum dilakukannya integrasi aplikasi dimasing masing OPD ke aplikasi Satu Data Daerah/OpenData yang selanjutnya akan di integrasikan ke Satu Data Indonesia yang merupakan bagian dari BIG Data

Solusi terhadap permasalahan :

1. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada penerapan aspek standar data, interoperabilitas data, metadata statistic, dan kode referensi dan/atau data induk serta menampilkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukan reviu dan evaluasi untuk memastikan peningkatan kualitas dilakukan secara berkesinambungan;
2. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada penerapan relevansi, akurasi, aktualisasi dan ketepatan waktu, aksesibilitas serta keterbandingan dan konsistensi;
3. Melakukan reviu secara berkala pada proses bisnis statistic yang dilakukan dalam perencanaan data, pengumpulan data dan pemeriksaan data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi proses bisnis statistic untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
4. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus memenuhi SDM yang memadai dan kapabel yang meliputi penerapan kompetensi SDM bidang Statistik dan penerapan kompetensi SDM bidang Manajemen data, dilakukan penyusunan ABK yang mengatur kebutuhan SDM bidang Statistik maupun Manajemen Data untuk seluruh unit kerja (OPD) di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
5. Perlu Peningkatan dalam pemanfaatan Big Data di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, pengelolaan kegiatan statistik dan penguatan Statistik Sektoral berkelanjutan

**5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik, dicapai melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

Tabel 3. 23 Program dan Kegiatan penunjang Capaian Kinerja Sasaran 3

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminsai Data Statistik Sektoral



Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan penghargaan tingkat nasional pada sasaran 3 sebagai peringkat 6 nasional pada penilaian indeks pembangunan statistik sektoral dengan capaian nilai 2, 98.

Sasaran 4 : Meningkatkan Keamanan informasi dalam mendukung SPBE

Sasaran 4 : "Meningkatnya Keamanan informasi dalam mendukung SPBE", diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja : "Jumlah Aplikasi yang di assesment dengan Indeks KAMI", dengan pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja sasaran 4 tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Jumlah Aplikasi yang di assesment dengan Indeks KAMI	1 aplikasi	1 aplikasi

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Indikator Jumlah Aplikasi yang di assesment dengan Indeks KAMI baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, self assesment atas penilaian indeks KAMI dengan 5 elemen penilaian, meliputi tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset dan aspek teknologi dipandu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi berkordinasi dengan BSSN (Badan Siber Sandi Negara) .

Untuk mendukung sasaran strategis penilaian assesment indeks KAMI akan lebih tepat apabila penilaian berdasarkan skor akhir hasil assesment, bukan dari jumlah aplikasi yang diassesment, karena satu aplikasi yang di assesment sudah mewakili penilaian satu OPD. Penilaian berdasarkan jumlah aplikasi juga menimbulkan adanya resiko tidak adanya tindak lanjut dari aplikasi yang telah diassesment, sehingga tidak menjadi suatu penilaian yang berkelanjutan.

Persentase ini memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan informasi yang diperlukan. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin banyak jumlah OPD yang mencapai tingkat keamanan informasi yang baik, menunjukkan komitmen dan upaya dalam melindungi data dan informasi yang mereka tangani. Aplikasi surat dinas elektronik (Aplikasi Srikandi) yang digunakan oleh semua OPD dan beberapa instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi sasaran pertama yang akan diamankan melalu penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan surat dinas di lingkungan Pemkab oleh pihak



yang tidak bertanggungjawab. Kemudian dengan sudah terselenggaranya sosialisasi keamanan informasi di seluruh OPD hingga Kecamatan dan Kelurahan terkait pengamanan informasi melalui TTE.

Pengamanan informasi aplikasi yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 yakni penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada 6 (enam) aplikasi, yakni Aplikasi JITU (Pelayanan Satu Pintu Terpadu) pada Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, aplikasi OSS pada Disnaker PMPTSP, Aplikasi Layanan Kependudukan (SIAK) pada Dindukcapil, Aplikasi SISMIOP dan SIMPATDA pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Aplikasi Srikandi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Adapun formulasi pengukuran dari indikator Jumlah Aplikasi yang di assesment dengan Indeks KAMI menggunakan aplikasi dari BSSN didukung ketersediaan bukti dukung atas 5 elemen penilaian yang ada. Target 1 aplikasi yang diassesment sudah dilaksanakan, walaupun hasil penilaiannya masih tidak layak karena bukti dukung atas aplikasi yang diassesment masih terbatas.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 pada Sasaran 4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Analisis dan evaluasi capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 3.25 Capaian Target dan Realisasi sasaran 4 tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja%
Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Jumlah Aplikasi yang diassesment dengan Indeks KAMI	1 aplikasi	1 aplikasi	100

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan Tabel dan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja sasaran 4 yaitu Meningkatkan Keamanan Informasi yang mendukung SPBE dengan 1 Indikator capaiannya 100%. Capaian Kinerja dari sasaran tersebut dikarenakan aplikasi yang diassesment 1 aplikasi telah dilaksanakan.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Dikarenakan Jumlah Aplikasi yang diassesment dengan Indeks KAMI ditetapkan sebagai indikator utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, sehingga belum bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

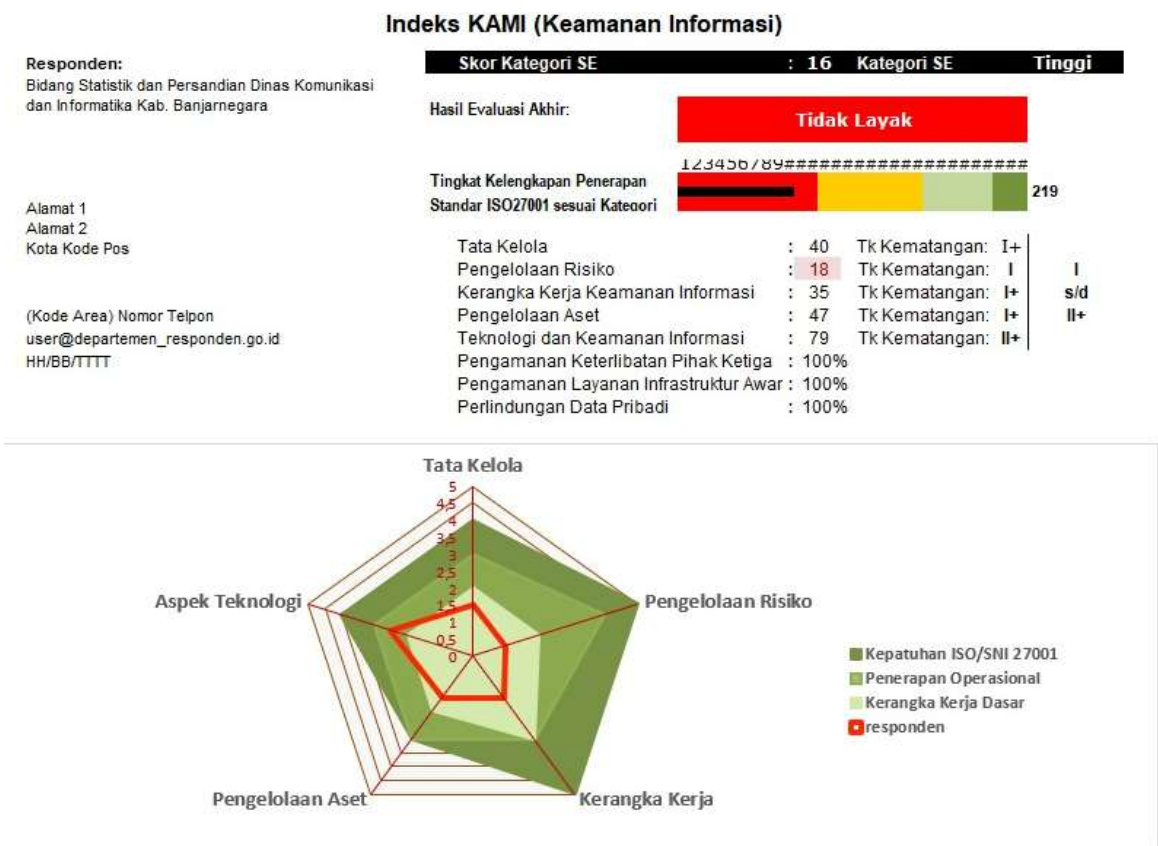
Tabel. 3.26 Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 4 Tahun 2022 - 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Aplikasi yang diassesment dengan Indeks KAMI					1 aplikasi	1 Aplikasi

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan Tabel dan uraian diatas capaian Tahun 2024,sudah memenuhi bahkan melampaui target. Hasil penilaian self assesment pada indeks KAMI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 terdapat pada Gambar 3.4 sebagai berikut :

Gambar. 3.4 Penilaian Indeks KAMI



3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA OPD

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target RENSTRA SKPD diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel. 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 4 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026

Indikator Kinerja		Target s/d 2024	Realisasi 2024	%
1.	Jumlah aplikasi yang diassesment dengan Nilai Indeks KAMI	3 aplikasi	1 aplikasi	33,33%

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja keberhasilan tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Masih kurangnya SDM di bidang Persandian;
- 2. Kompetensi SDM persandian yang masih kurang;
- 3. Sistem Keamanan Informasi yang belum terbangun;
- 4. Penilaian Indeks KAMI secara mandiri belum mencapai nilai yang ditargetkan karena data dukung belum lengkap

Solusi terhadap permasalahan :

- 1. Penambahan SDM di bidang Persandian seperti sandiman dan manggala informatika
- 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Bidang persandian dan telekomunikasi;
- 3. Kerja sama dan koordinasi yang lebih intens dengan BSSN dan OPD terkait ;
- 4. Melengkapi dokumen untuk data dukung penilaian Indek KAMI agar mencapai target.



5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 4 : *Meningkatnya Kualitas Layanan Persandian*, dicapai melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

Tabel. 3.28 Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 4

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Sasaran 5 :	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
-------------	--

Sasaran 5 : ” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika”,

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “*Nilai Survey Kepuasan Masyarakat*”. Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarakat. Formulasi pengukurannya adalah membandingkan antara Total nilai persepsi per unsur dibagi dengan Total unsur yang terisi. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Tabel. 3.29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	84,40	84,50	100,12

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Indikator Kinerja yang mendukung meningkatnya survey kepuasan masyarakat dapat kami ilustrasikan sebagai berikut :

- 1) Indikator ke 1 (satu) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 diperoleh nilai 84,50 dengan pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :



Tabel. 3.30 Unsur Pelayanan SKM sasaran 5

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1.	Persyaratan	3,120
2.	Prosedur	3,200
3.	Waktu Pelayanan	3,140
4.	Biaya / Tarif	3,960
5.	Produk Layanan	3,100
6.	Kompetensi Pelaksana	3,240
7.	Perilaku Pelaksana	3,860
8.	Penanganan Pengaduan	3,720
9.	Kenyamanan Tempat Layanan	3,080

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Pada tabel tersebut diatas diperoleh nilai indeks untuk pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 3,380 dan setelah dikonversikan dengan nilai nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 84,50. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di Kantor Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah **BAIK..** Namun dari 9 unsur penilaian yang hasilnya kurang memuaskan adalah dari unsur Produk Kenyamanan Tempat Layanan (Dinkominfo belum memiliki Gedung kantor, sejak 2017 hingga sekarang masih menempati Gedung setda lantai 2, dan tidak ada akses bagi penyandang disabilitas).

Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat memenuhi target nilai 84,50 namun masih perlu peningkatan pelayanan khususnya pada unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perlu disederhanakan sehingga memudahkan bagi pengguna layanan.
2. Prosedur pelayanan Tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan untuk lebih disederhanakan.
3. Waktu pelayanan. Jangka waktu yang diperlukan untuk setiap menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan untuk lebih diefisiensikan waktunya.

- 4. Produk Pelayanan. Produk pelayanan yang di hasilkan untuk dievaluasi agar lebih tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 5. Kenyamanan Tempat Pelayanan. keterbatasan tempat layanan yang representatif disebabkan masih menempati di gedung sekretariat Daerah di lantai 2 yang belum bisa memberikan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- 6. Fasilitas tempat tunggu. Belum tersedianya tempat tunggu yang representatif disebabkan masih menempati di gedung sekretariat Daerah. Sehingga perlu adanya gedung kantor tersendiri untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat pengguna layanan
- 7. Perilaku pelaksana. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan perlu ditingkatkan lebih baik lagi bagi pengguna layanan.
- 8. Maklumat Pelayanan. Komitmen untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart masih perlu ditingkatkan.
- 9. Penanganan Pengaduan. Penanganan pengaduan dan tindak lanjut masih perlu dievaluasi dan diperbaiki lagi agar pengaduan tersebut bisa segera tertangani.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel. 3.31 Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 5 Tahun 2022 – 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83,80	104,75	84,39	100,46	84,50	100,12

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa nilai survey kepuasan masyarakat mengalami fluktuasi selama 6 tahun terakhir. Namun, secara keseluruhan, nilai survey kepuasan masyarakat meningkat sebesar 24,78 poin dari tahun 2019 hingga tahun 2024.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif.



Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Sebagai salah satu pendukung pelaksanaan administrasi yang baik, Dinkominfo telah bekerja keras dan mendapatkan predikat 3 terbaik dalam penilaian pengawasan kearsipan internal. Dengan demikian Dinkominfo telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola arsip dengan baik dan memenuhi standar kearsipan yang ditetapkan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinkominfo dalam pengelolaan informasi dan arsip.

Gambar . 3.5 Penyerahan Penghargaan peringkat ke 3 dalam penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024



Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH/RENSTRA OPD

Tabel. 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 5 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	Capaian (4/3)*100
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,40	84,50	100,12%

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Target Renstra Dinkominfo 2024 untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar Nilai 84,50 telah terlampaui pada Tahun 2024 ini.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

- 1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dengan OPD/SKPD beserta instansi terkait;
- 2. Komitmen dari aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Gambar 3.6 Lokasi Dinas Komunikasi dan Informatika menempati Gedung Setda Kabupaten Banjarnegara Lantai 2



Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung karena belum ada gedung kantor untuk layanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika selama ini masih menempati lantai 2 Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, hal ini menyebabkan kendala pelayanan public terutama kesulitan akses penyandang disabilitas dan keterbatasan penempatan ruang pelayanan public dan aduan.
2. Kurangnya SDM khususnya di bidang teknis IT, programmer dan jaringan, SDM persandian dan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Solusi terhadap permasalahan :

1. Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai sesuai unsur pelayanan;
2. Penambahan SDM dan peningkatan SDM di bidang IT.

Kesimpulan (diambil dari laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1. SKM unit pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar : 84,50 (Kategori B) ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sudah ideal dengan predikat atau tingkatan PUAS.
2. Bahwa pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika sudah baik, namun demikian masyarakat / pengguna layanan berharap lebih ditingkatkan lagi.
3. Pelayanan informasi terkadang membutuhkan lama, hal ini terkait dengan jaringan IT yang kadang mengalami kendala.

REKOMENDASI (diambil dari laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara) sebagai berikut :

1. Untuk dapat lebih maksimal dalam pelayanan maka sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informatika diberi sarana dan prasarana layanan publik tersendiri (Gedung kantor dan sarana prasarana penunjang lainnya).
2. Dalam rangka mewujudkan komitmen public kearah yang lebih baik, maka survey tentang opini publik dalam hal kepuasan masyarakat atas Pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika akan dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

5. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, didukung dengan melalui 1 (satu) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu :

Tabel 3.33 Program dan Kegiatan penunjang capaian
kinerja sasaran 5(lima)

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat yang memperoleh pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan survey kepuasan yaitu seluruh OPD dan Instansi terkait.



Sasaran 6 :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
-------------	---

Sasaran 6 : ” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika”. Indikator ini dipilih untuk mengetahui nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan formulasi pengukuran yaitu Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Adapun hasil penilaian SAKIP pada tahun 2024 sebagai berikut :

Pada tahun 2024 memperoleh nilai dari 72,10 dengan pencapaian masing-masing komponen penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Komponen penilaian manajemen kinerja

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Penilaian
1.	Perencanaan kinerja	30%	22,20
2.	Pengukuran kinerja	30%	21,60
3.	Pelaporan kinerja	15%	10,80
4.	Evaluasi internal	10%	17,50
Penilaian		100%	72,10

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Pada tabel tersebut diatas setelah dikonversi diperoleh nilai sebesar 72,10 dengan kategori BB.

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Tabel 3.35 Target dan Realiasi Indikator Kinerja sasaran 6 tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai SAKIP OPD	69,40	72,10	103,89
	Kategori	B	B	

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah 69,40 (Kategori B), dari hasil Penilaian Tim Sakip Kabupaten Banjarnegara memperoleh Nilai sebesar 72,10 dengan kategori BB.



2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel. 3.36 Perbandingan Capaian Kinerja sasaran 6
Tahun 2022 – 2024

Indikator Kinerja		2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP OPD	66,36 B	110,60	69,40 B	113,77	72,10 BB	103,89

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH/RENSTRA OPD

Tabel. 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 5 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2026	Realisasi 2024	Capaian (4/3)*100	Keterangan
	Nilai Akuntabilitas instansi Pemerintah	69,40	72,10	103,89%	Tercapai / belum tercapai

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Target Renstra Dinkominfo 2024 untuk Nilai SAKIP OPD sebesar 69,40 dengan Kategori B, sedangkan pada Tahun 2024 ini telah mencapai nilai 72,10 (BB) sehingga sudah melampaui target Renstra 2024.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

- 1. Koordinasi yang baik antara Sekretariat sebagai penyusun dan pengumpul data SAKIP dengan bidang-bidang ;
- 2. Komiten dari Pimpinan dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja.



Permasalahan dalam pencapaian indikator :

1. Belum terdokumentasi dengan baik data-data yang diperlukan untuk proses evaluasi SAKIP;
2. Kurangnya Kompetensi SDM dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja.
3. Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang direncanakan.
4. Pengukuran Kinerja belum dapat dijadikan sebagai penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
5. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
6. Dokumen Laporan Kinerja belum di reviu secara optimal pada setiap jenjangnya.
7. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Solusi terhadap permasalahan :

1. Penertiban data perencanaan dan evaluasi kinerja;
2. Peningkatan kompetensi SDM perencanaan.
3. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mendukung capaian kinerja sesuai standar
4. Perencanaan kinerja dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
5. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai dalam pencapaian kinerja yang direncanakan
6. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, serta melakukan penyelarasan antara dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja
7. Dokumen laporan kinerja di reviu secara memadai
8. Menyusun dokumen kinerja sesuai standar, yang menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

- 9. Informasi kinerja menjadi perhatian utama pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.
- 10. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
- 11. Evaluasi kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja dan sesuai standar secara memadai.

5. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, *didukung dengan* 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

Tabel 3.38 Program dan kegiatan Penunjang Capaian Sasaran 6

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Nilai SAKIP OPD diperoleh dari evaluasi oleh Inspektorat atas SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Evaluasi ini dilakukan terhadap 4 (empat) komponen besar yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal. Hasil Evaluasi dengan nilai 72,10 dengan kategori BB atau Sangat Baik dengan interprestasi Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan masih perlu adanya perbaikan.



Gambar 3.7 Pengukuran Kinerja E-SAKIP



Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

B. REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pencapaian Kinerja Akuntabilitas bidang keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran. Untuk alokasi anggaran Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.426.200,- anggaran belum memenuhi target sebesar Rp.4.573.800,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.39 Pendapatan Dinkominfo tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Anggaran Pendapatan	Realisasi Anggaran Pendapatan	Surplus/ Defisit	%
1.	Hasil Kerja Sama Daerah	60.000.000	55.426.200	-4.573.800.	92,38
Jumlah		60.000.000	55.426.200	-4.573.800.	92,38

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Untuk membiayai operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 mendapat anggaran sebesar Rp. 8.036.858.792,-, kemudian bertambah sebesar Rp. 314.872.906 pada refocussing menjadi Rp.8.351.731.698,-,. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.7.978.586.656,- atau sebesar 95,53 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.40 Realisasi Belanja Dinkominfo tahun 2024

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.820.326.498	4.590.135.019	95,22
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.134.330.000	1.115.606.785	98,35
3	Program Aplikasi Informatika	2.170.865.200	2.053.783.022	94,61
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	94.100.000	91.049.000	96,76
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	132.110.000	128.012.830	96,90
	Jumlah	8.351.731.689	7.978.586.656	95,53

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.41 Realisasi Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024

No.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.590.000	15.454.080	95,22
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.190.000	7.102.960	98,79
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.400.000	8.351.120	99,42
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.929.394.198	3.807.035.560	98,43
3	Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.884.499.198	3.762.140.560	96,85
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.895.000	44.895.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.499.100	359.707.002	92,58
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.636.000	96,36
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	392.179.100	331.351.002	84,49
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.320.000	18.720.000	96,89
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.490.400	117.650.000	99,29
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.490.400	117.650.000	99,29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.410.000	204.255.377	82,70
10	Penyediaan Jasa Komunikasi,	60.000.000	46.471.282	77,45

	Sumber Daya Air dan Listrik			
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.410.000	157.794.095	87,95
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.942.800	86.033.000	90,53
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	51.037.500	45.282.000	88,72
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	24.966.800	21.301.000	85,32
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.938.500	19.450.000	97,55
	JUMLAH	4.820.326.498	4.590.135.019	95,22

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Total anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 4.820.326.498,- dan terealisasi sebesar Rp.4.590.135.019,-. Realisasi keuangan yang sebesar 95,22% hal-hal yang berpengaruh terhadap persentase penyerapan anggaran ini disebabkan adanya antisipasi kekurangan belanja gaji dan tunjangan ASN, efisiensi belanja logistik, jasa penunjang, belanja jasa pelayanan umum kantor dan belanja jasa pemelihaaran yang kurang maksimal.

Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.42 Realisasi Belanja Program Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.134.330.000	1.115.606.785	98,35
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12.000.000	10.663.000	88,86
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	224.760.000	223.141.000	99,28
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	152.800.000	146.207.459	95,69
4	Pelayanan Informasi Publik	96.700.000	87.927.168	90,93
5	Layanan Hubungan Media	400.320.000	399.918.258	99,90
6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.000.000	99.999.900	99,99
7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	147.750.000	147.750.000	100
	JUMLAH	1.134.330.000	1.115.606.785	98,35

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024



Total anggaran program Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar **Rp. 1.134.330.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.115.606.785,-** Realisasi keuangan yang sebesar 98,35% ini disebabkan karena efisiensi belanja pada sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik juga belanja jasa tenaga pelayanan umum pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada anggaran perubahan direncanakan akan menambah tenaga penyiar, sehingga ditambahkan sebanyak rencana penambahan tenaga tersebut tetapi sampai bulan Desember tahun 2024 tidak terlaksana penambahan tenaga.

Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

*Tabel 3.43 Realisasi Belanja Program Aplikasi Informatika
tahun 2024*

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.170.865.200	2.053.783.022	94,61
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.239.330.000	1.190.358.252	96,05
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	931.535.200	863.424.770	94,19
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.077.100	93,85
3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	663.745.200	601.282.670	90,59
4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	252.790.000	248.065.000	98,13
	JUMLAH	2.170.865.200	2.053.783.022	94,61

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024



Program Aplikasi Informatika Total anggaran sebesar **Rp.2.170.865.200,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.053.783.022,-** . Realisasi keuangan yang hanya sebesar 94,61% ini disebabkan karena tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah di karenakan efisiensi anggaran belanja modal karena turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar,

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.44 Realisasi Belanja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.100.000	91.049.000	96,76
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	94.100.000	91.049.000	96,76
	JUMLAH	94.100.000	91.049.000	96,76

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Total anggaran program ini sebesar Rp 94.100.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 91.049.000,- atau sebesar 96,76%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan adanya efisensi anggaran.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.45 Realisasi Keuangan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.110.000	128.012.830	96,90
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	132.110.000	128.012.830	96,90

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024



Total anggaran program ini sebesar Rp 132,110,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 128.012.000,- atau sebesar 96,90%. Realisasi anggaran yang tidak tercapai hingga 100% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada transport akomodasi narasumber sosialisasi.

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam hal akuntabilitas keuangan, LKjIP menginformasikan realisasi penyerapan anggaran pada tahun berjalan sesuai pagu anggaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan standar analisis biaya melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 979 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Biaya (ASB). Peraturan ini menetapkan standar harga satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, dan lain-lain yang digunakan sebagai tandar harga satuan biaya kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan kegiatan dan sumber daya.

III.1. SASARAN 1

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1, Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi didukung oleh 1 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.170.865.200,- , realisasi keuangan sebesar Rp.2.053.783.022,- (94,61%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 117.082.178,- (5,39%), hal ini disebabkan terdapat sisa kontrak/ efisiensi anggaran pada Pengadaan belanja Barang / Jasa bidang telematika, karena penurunan nilai barang / jasa karena penurunan nilai tukar dolar. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 3.46 Analisis efisiensi sumber daya Sasaran 1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.170.865.200	2.053.783.022	94,61	100	117.082.178	5,39
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.239.330.000	1.190.358.252	96,05	100	48.971.748	3,95
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.239.330.000	1.190.358.252	96,05	100	48.971.748	3,95



	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	931.535.200	863.424.770	94,19	100	68.110.430	7,31
2	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.077.100	93,85	100	922.900	6,15
3	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	663.745.200	601.282.670	90,59	100	62.462.530	9,41
4	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	252.790.000	248.065.000	98,13	100	4.725.000	1,87

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

III.2. SASARAN 2

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Didukung dengan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan total anggaran sebesar Rp. 1.134.330.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 1.115.606.785,- (96,38%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 18.723.215,- (1,65%). Hal ini disebabkan pada Sub Kegiatan Monintoring Opini dan Aspirasi Publik terdapat efisiensi nilai kontrak, pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik terdapat sisa efisiensi pengadaan nilai kontrak transport narasumber sehingga anggaran yang sudah dianggarkan di Anggaran Perubahan tidak terealisasi.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel . 3.47 Analisis efisiensi sumber daya Sasaran 2

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.134.330.000	1.115.606.785	98,35	100	18.723.215	1,65
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan	1.134.330.000	1.115.606.785	98,35	100	18.723.215	1,65

	Komunikasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12.000.000	10.663.000	88,86	100	1.337.000	11,14
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	224.760.000	223.141.000	99,28	100	1.619.000	0,72
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	152.800.000	146.207.459	95,69	100	6.592.541	4,31
4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	96.700.000	87.927.168	90,93	100	8.772.832	9,07
5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	400.320.000	399.918.258	99,90	100	401.742	0,10
6	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.000.000	99.999.900	99,99	100	100	0,01
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	147.750.000	147.750.000	100	100	0	0

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

III.3. SASARAN 3

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3, Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 94.100.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 91.049.000,- (96,76%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3. 48 Analisis efisiensi sumber daya Sasaran 3

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	94.100.00	91.049.000	96,76	100	3.051.000	3,24



	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.100.00	91.049.000	96,76	100	3.051.000	3,24
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	94.100.00	91.049.000	96,76	100	3.051.000	3,24

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

III.4. **SASARAN 4**

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4, Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 132.110.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 128.012.830,- (96,90%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 3.49 Analisis efisiensi sumber daya Sasaran 4

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	132.110.000	128.012.830	96,90	100	4.097.170	3,10
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.110.000	128.012.830	96,90	100	4.097.170	3,10
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	132.110.000	128.012.830	96,90	100	4.097.170	3,10

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024



III.5. SASARAN 5

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, didukung oleh 1 program, 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan di Sekretariat. Program yang mendukung capaian tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 4.820.326.498,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 4.590.135.019 (95,22%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi/ sisa anggaran sebesar Rp. 230.191.479,- (4,78%). Hal ini disebabkan perhitungan atas antisipasi kekurangan gaji ASN dan kenaikan tambahan penghasilan ASN, mutasi non ASN menjadi ASN dan beberapa jabatan yang masih belum dipenuhi, masih menggunakan PLT sampai dengan akhir tahun 2024, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap prosentase penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 3.50 Analisa Efisiensi Sumber Daya Sasaran 5

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.820.326.498	4.590.135.019	95,22	100	230.191.479	4,78
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.929.394.198	3.807.035.560	98,43	100	122.358.638	3,11
1	Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.884.499.198	3.762.140.560	96,85	100	122.358.638	3,15
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.895.000	44.895.000	100	100	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.499.100	359.707.002	92,58	100	61.792.098	14,66
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.636.000	96,36	100	364.000	3,64
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	392.179.100	331.351.002	84,49	100	60.828.098	15,51
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.320.000	18.720.000	96,89	100	600.000	3,11
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.410.000	204.255.377	82,70	100	35.154.623	14,68

6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	46.471.282	77,45	100	13.528.718	22,55
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.410.000	157.784.095	87,95	100	21.625.905	12,05
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.490.400	117.650.000	99,29	100	840.400	0,71
8	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.490.400	117.650.000	99,29	100	840.400	0,71
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.942.800	86.033.000	90,53	100	9.909.800	10,33
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	51.037.500	45.282.000	88,72	100	5.755.500	11,28
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	24.966.800	21.301.000	85,32	100	3.665.800	14,68
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.938.500	19.450.000	97,55	100	488.500	2,45

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

III.6. SASARAN 6

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 6, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan di Sekretariat. Program yang mendukung capaian tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 15.590.000,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 15.454.080,- (99,10%) dan realisasi fisik sebesar 100%,

Jumlah anggaran yang sangat kecil dan hanya diperuntukkan makan minum rapat penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Efisiensi didapatkan dari pemanfaatan anggaran yang kecil tersebut untuk tetap memenuhi target kinerja 100 %, yaitu tersusunnya dokumen perencanaan 7 dokumen dan dokumen pelaporan sebanyak 7 dokumen. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan dan sub kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.51 Analisis efisiensi sumber daya Sasaran 6

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik	Efisiensi Keuangan	
			Rp	%		Rp	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.590.000	15.454.080	99,10	100	135.920	0,87
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.590.000	15.454.080	99,10	100	135.920	0,87
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.190.000	7.102.960	98,79	100	87.040	1,21
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.400.000	8.351.120	99,42	100	48,880	0,58

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

IV. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang / jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa oleh Kementrian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang /Jasa. Tidak ada pelaksanaan pemilihan penyedia Barang / Jasa (tender) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

Selama tahun 2024 untuk pengadaan barang / jasa di dalam ecatalog dilaksanakan dengan metode e-Purchasing sebanyak 36 paket dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 3.610.821.020,- terealisasi pengadaan sebesar Rp.3.396.999.096,- untuk belanja barang / jasa terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,92%.



D. PENGHARGAAN

Pada Tahun 2024, penilaian indeks pembangunan statistik sektoral yang mendapatkan anugerah sebagai peringkat ke 6 tingkat Nasional.

Gambar. 3.8 Penyerahaan Penghargaan indeks pembangunan statistik sektoral



Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Dengan pencapaian ini, diharapkan kegiatan statistic akan semakin memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Tabel. 3.52 Penghargaan tingkat nasional tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan	Pemberi Penghargaan	Manfaat untuk Kab. Banjarnegara
1	Peringkat 6 Nasional	2024	Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas data statistic sektoral dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat• Data statistik yang akurat dan reliablemendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien• Meningkatkan kemampuan analisis data meningkatkan kemampuan analisis data di Banjarnegara, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang

				<p>lebih tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan penghargaan dan rekomendasi: Banjarnegara juga mendapatkan penghargaan dan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik RI, yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai organisasi sesuai anggaran yang telah digunakan. Laporan kinerja ini mengindikasikan tingkat keberhasilan efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, capaian kinerja ditunjukkan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024. Secara rinci pelaksanaan 6 (enam) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja setelah penyelarasan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dikategorikan sangat tinggi (100%).

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 rata-rata telah mencapai target-target yang telah ditetapkan/direncanakan, disebabkan oleh :

- a. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan terarah, sesuai dengan yang direncanakan
- b. Anggaran pada tahun 2024 telah direalisasikan dengan prinsip efisiensi sesuai kebutuhan dan prioritas yang tepat
- c. Kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kegiatan di Sekretariat dan 3 (tiga) bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika, hal ini sangat mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU STRATEGIS

Dalam rangka menyelesaikan isu-isu strategis yang telah ditetapkan, perlu dilaksanakan rapat koordinasi terkait indeks SPBE, Smart City, Keterbukaan Informasi Publik, peningkatan kecukupan SDM TIK dan pengelola statistik dan persandian, peningkatan kinerja infrastruktur TIK sesuai dengan standar dan regulasi serta perlunya meningkatkan kolaborasi dengan OPD.

C. KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA MENDATANG

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang terdiri dari langkah strategis dan operasional, sebagai berikut :

1. Langkah strategis :

- a. Mengidentifikasi Tujuan dan Prioritas : Mengidentifikasi tujuan dan prioritas organisasi untuk memastikan bahwa semua upaya peningkatan kinerja terarah pada pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
- b. Mengembangkan Rencana Strategis : Mengembangkan rencana strategis yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kinerja, termasuk target, indikator, dan sumber daya yang diperlukan.
- c. Mengoptimalkan Proses dan Sistem : Mengoptimalkan proses dan sistem yang ada untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas.

2. Langkah Operasional

- a. Mengidentifikasi Kegiatan yang Perlu Diperbaiki : Mengidentifikasi kegiatan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Mengembangkan Program Pelatihan : Mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia.
- c. Mengimplementasikan Teknologi Baru: Mengimplementasikan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas.

3. Langkah Pemantauan dan Evaluasi :

- a. Mengembangkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi: Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas upaya peningkatan kinerja.
- b. Mengidentifikasi dan Mengatasi Masalah: Mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang timbul selama proses peningkatan kinerja.
- c. Menggunakan Hasil Evaluasi untuk Perbaikan: Menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai kata penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yakni bahwa Tim Kerja kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang ada guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.

Namun demikian apabila dalam penyusunan LKjIP ini dipandang masih terdapat kekurangan kami menerima saran masukan dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini.

Demikian laporan ini kami buat semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, Maret 2025
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA



BARIYADI DJUMPAEDO, S.Sos

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19680105 199803 1 006

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218, 591218, 591213
(PABX) Telex 25644, Fax (0286) 591187
BANJARNEGARA 53414

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Barijadi Djumpaedo, S. Sos.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Muhamad Masrofi, S. Sos., M. Si.

Jabatan : Pj. Bupati Kabupaten Banjarnegara

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 16 September 2024

Pihak Kedua
PJ. BUPATI BANJARNEGARA

MUHAMAD MASROFI, S. Sos., M. Si.

Pihak Pertama
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

BARIJADI DJUMPAEDO, S. Sos.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19680105 1998031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks SPBE	3,30	3,30
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 2. Persentase Aduan yang tertangani	78 100%	78 100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Statistik	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,10	2,10
4	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE	Jumlah Sistem Elektronik/ aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI	1	1
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,20	84,20
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP OPD	B (69,41)	B (69,41)

Banjarnegara, 16 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI BANJARNEGARA

MUHAMMAD BASROFI, S. Sos., M. Si.

Pihak Pertama
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BARIJADI DJUMPAEDO, S. Sos.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
NIP. 19680105 1998031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.194.328.592,-	Rp. 4.820.326.498,-	APBD
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 941.500.000,-	Rp. 1.134.330.000,-	APBD
3	Program Aplikasi Informatika	Rp. 1.706.930.200,-	Rp. 2.170.865.200,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 94.100.000,-	Rp. 94.100.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 100.000.000,-	Rp. 132.110.000,-	APBD

Banjarnegara, 16 September 2024

Pihak Kedua

PJ. BUPATI BANJARNEGARA
MUHAMAD MASROFI, S. Sos., M. Si.

Pihak Pertama

PI. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BORJADI DUMPAEDO, S. Sos.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680105 1998031006

PENGUKURAN KINERJA
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

Triwulan IV																								
No	Indikator RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW IV TH 2024		Program	Indikator Program	TW IV TH 2024		Kegiatan	Indikator Kegiatan	TW IV TH 2024		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	TW IV TH 2024		Anggaran						
				Target	Realisasi (%)			Target	Realisasi (%)			Target	Realisasi (%)			Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	Target	Realiasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks SPBE	3,30	100,00%	Program Aplikasi Informatika	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100,00%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	44 OPD	100,00%	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 unit	100,00%	1.239.330.000	1.190.358.252	96,05%				
							Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100,00%	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pusat data pemerintah / data center	100%	100,00%	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	231 dokumen	100,00%	15.000.000	14.077.100	93,85%				
														Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	1 aplikasi	100,00%	663.745.200	601.282.670	90,59%				
														Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	3 dokumen	100,00%	252.790.000	248.065.000	98,13%				
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik	78,00	100,00%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat	100	100,00%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JumlahMedia yang dikelola	16 media	100,00%	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	100,00%	96.700.000	87.927.168	90,93%				

			Persentase Aduan yang tertangani (jumlah aduan yang tertangani/ jumlah aduan yang masuk * 100%)	100%	100%									Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	(jumlah aduan yang tertangani/ jumlah aduan yang masuk * 100%)	Jumlah Aduan	100,00%	12.000.000	10.663.000	88,86%
														Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen	100,00%	224.760.000	223.141.000	99,28%
														Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	100,00%	152.800.000	146.207.459	95,69%
														Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 layanan	100,00%	400.320.000	399.918.258	99,90%
														Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 orang	100,00%	100.000.000	99.999.900	100,00%
														Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 dokumen	100,00%	147.750.000	147.750.000	100,00%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,1	141,90% (NIPSS : 2,98)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	100%	85,00%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100,00%	85,00%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen	100,00%	94.100.000	91.049.000	96,76%

4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI	1	100,00%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Aplikasi yang di asesmen indeks KAMI	23,41%	100,00%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang diasesmen keamanan informasinya	6 aplikasi	100,00%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 aplikasi	100,00%	132.110.000	128.012.830	96,90%
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,40	100,12% (84,50)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan	100	100,00%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan daerah	2 laporan	100,00%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang	100,00%	3.884.499.198	3.762.140.560	96,85%
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110 dokumen	100,00%	44.895.000	44.895.000	100,00%	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	3 laporan	100,00%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	3 paket	100,00%	10.000.000	9.636.000	96,36%
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	100,00%	392.179.100	331.351.002	84,49%	
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	276 eksemplar	100,00%	19.320.000	18.720.000	96,89%	
										Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	2 laporan	80,00%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	100,00%	118.490.400	117.650.000	99,29%
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan daerah	2 laporan	100,00%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100,00%	60.000.000	46.471.282	77,45%

														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	100,00%	179.410.000	157.784.095	87,95%
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	3 laporan	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	100,00%	51.037.500	45.282.000	88,72%
														Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	100,00%	24.966.800	21.301.000	85,32%
														Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 unit	100,00%	19.938.500	19.450.000	97,55%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP OPD	B / 69,42	103,86% BB / 72,10	Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	100	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	14 dokumen	100,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	100,00%	7.190.000	7.102.960	98,79%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	100,00%	8.400.000	8.351.120	99,42%
																		8.351.731.698	7.978.586.656	95,53%

Banjarnegara, Desember 2024

Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara



BARLIADI RUMPAEDO, S.Sos
Kepala Muda
NIP. 19680105 199803 1 006

ANALISIS KETERCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA

Triwulan IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW IV TH 2024		TW IV TH 2024	
			Target	Realisasi (%)	Analisis Ketercapaian*	Solusi**
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks SPBE	3,30	112,73% (3,72: sangat baik)	Telah dilakukan evaluasi penilaian dai Kemenpan RB dengan hasil 3,72 (predikat sangat baik)	Melengkapi data dukung yang diperlukan untuk evaluasi oleh asessor eksternal
2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Nilai Keterbukaan Informasi publik	78	114,82% (89,56 : menuju informatif)	Terjadi peningkatan nilai Keterbukaan Informasi Publik yang signifikan, Banjarnegara mendapatkan predikat Menuju Informatif.	Tahun 2025, mengadakan Monev Keterbukaan Informasi di OPD, Pembentukan PPID Desa.
		2. Persentase Aduan yang tertangani	100%	100%	Menerima semua aduan yang masuk,ditindaklanjuti dan diterukan kepada OPD terkait	Perlu adanya peningkatan kecepatan waktu dalam merespon aduan dari masyarakat.
3	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (EPSS)	2.10	141,90% (2,98)	Terselenggaranya Penilaian Indeks Pembangunan Statistik di Kabupaten Banjarnegara secara berkala yang menjadikan dasar buat melakukan evaluasi dan tindak lanjut bagi OPD yang di jadikan sample dalam pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Statistik Sektoral di Kabupaten Banjarnegara	Melakukan Review setiap akhir tahun dan merencanakan kembali pembinaan kepada OPD yang akan di tunjuk untuk di jadikan sample dalam penilaian penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Jumlah sistem elektronik / aplikasi yang dilakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi/ siber menggunakan indeks KAMI	1 aplikasi	100%	Sudah terlaksananya sosialisasi keamanan informasi ke semua OPD	meningkatnya keamanan informasi di tingkat OPD
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,40	100,12% (84,50)	Sudah dilaksanakan survey, Dinkominfo sejak tahun 2024 sudah menerapkan standar Pelayanan dan SOP Pelayanan, ditindaklanjuti dengan RTP atas Pelayanan dan Pengendalian Internal	Meningkatkan standar Pelayanan dan jangkauan Pelayanan kepada OPD dan masyarakat
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP OPD	B / 69,41	103,88% BB / 72,10	Meningkatkan pelaporan kinerja pegawai dan melaksanakan pertemuan (Staf meeting) rutin minimal setiap sebulan sekali	Menguatkan Tim Kerja di masing-masing bidang dan sekretariat, evaluasi terhadap target, sasaran dan capaian kinerja

Catatan :

- * Masing-masing realisasi ada analisis ketercapaian (memuat penyebab keberhasilan /
- ** Solusi yang telah dilakukan
- *** Tulis Periode Pengkuran Kinerja

Banjarnegara, Desember 2024
Pdt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara

BARISDI NUNTAEDO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 199803 1 006

ANALISIS KETERCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA

Triwulan IV

No	Program	Indikator Program	TW IV TH 2024		TW IV TH 2024	
			Target	Realisasi (%)	Analisis Ketercapaian*	Solusi**
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Aplikasi Informatika	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100%	Semua OPD sudah tersambung namun penerimaan kapasitas bandwith belum optimal	Peningkatan Kualitas Jaringan dengan penggantian kabel STP menjadi FO pada kantor Setda dan Optimalisasi kapasitas Bandwith dari 100Mbps menjadi 1Gb pada 7 OPD dengan melakukan penggantian converter.
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100%	Serangan siber pada website dan aplikasi pemerintah	Penyediaan antivirus pada server aplikasi dan end user Penyediaan firewall full protection pada data center
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi bagi masyarakat	100	100%	Sudah dibuat akun Tik Tok	Melakukan Update Informasi pada masing-masing media yang dikelola.
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	100	100%	Terlaksananya kegiatan evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023	Melakukan review pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dan membuat rencana pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring kepada OPD yang akan di tunjuk sebagai sample dalam evaluasi di Tahun 2025
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Aplikasi yang di asesmen indeks KAMI	4,50%	100%	Telah dilaksanakan Assessment pada aplikasi SATU DATA dengan hasil tidak layak (skor sementara setelah dilakukan pendampingan dengan KOMINFO Provinsi yaitu 219)	Melakukan asessment terhadap tata kelola keamanan dan manajemen resiko
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan	100	100%	Melaksanakan Pengendalian Operasional Kegiatan internal rutin	Meningkatkan pelayanan administrasi, keuangan dan kepegawaian dengan memaksimalkan pegawai yang ada
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	100	100%	Telah tersusun dokumen perencanaan RKA, DPA, LKJIP, LPPD, Laporan Keuangan	Evaluasi terhadap hasil capaian di dibandingkan dengan target waktu dan sasaran program dan peningkatan di tahun 2024

Catatan :

- * Masing-masing realisasi ada analisis ketercapaian (memuat penyebab keberhasilan / kegagalan atau p
- ** Solusi yang telah dilakukan
- *** Tulis Periode Pengukuran Kinerja

Banjarnegara, Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara

BARI ADI MUDA PAEDO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 199803 1 006

ANALISIS KETERCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA

Triwulan IV

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	TW IV TH 2024		TW IV TH 2024	
			Target	Realisasi (%)	Analisis Ketercapaian*	Solusi**
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	44 OPD	100,00%	- Melakukan Upgrade Peralatan dan Sistem Keamanan Jaringan - Melakukan Upgrade infrastruktur LAN Setda dan datacenter	- Meningkatkan sistem keamanan, aplikasi, dan jaringan. - Meningkatkan kestabilan dan konektivitas sistem dan jaringan internet
2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani pusat data pemerintah / data center	100%	100,00%	Optimalisasi pemanfaatan pusat data untuk fasilitasi penyimpanan aplikasi dan server milik OPD	Untuk meningkatkan keamanan siber telah dilakukan pembaharuan perangkat firewall dan penambahan software antivirus
3	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Informasi yang Dikelola	16 Media	100,00%	Terkelolanya 16 Media Informasi yang dikelola Pemerintah. Media Informasi yang dikelola mulai dari Media Sosial (IG, FB, Twitter, Tiktok, Youtube), Media Aduan (LaporGub, LaporBup, WhatsApp Gateway, Lapor SP4N), Radio, Website, Media Luar Ruang (Baliho), Papan Informasi, Majalah Derap Serayu.	Melakukan Update informasi secara berkala terhadap media yang dikelola.
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	4 dokumen	100,00%	Telah tersusunnya Buku Statistik Sektoral OPD	Melakukan Evaluasi Data Statistik Sektoral Tahun 2024 dan memetakan rencana kegiatan Statistik Sektoral 2025
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang diasesmen keamanan informasinya	6 aplikasi	100,00%	Aplikasi yang telah terintegrasi dengan BSRE (Balai Sertifikasi Elektronik) untuk tanda tangan elektronik , Aplikasi yang sudah terintegrasi sebagai berikut SIMPATDA, SISMIOP, E-KGB, JITU, KHS, SISPERTANI (ON PROSESS)	Meningkatakan penggunaan tanda tangan elektronik
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan daerah	2 laporan	100,00%	Telah tersusunnya laporan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium Pengelola Keuangan OPD	Meningkatkan disiplin pegawai dalam penandatanganan dokumen gaji dan tunjangan di tahun 2024
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	3 laporan	100,00%	Terlaksananya pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor, logistik dan surat kabar sampai dengan triwulan IV	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor serta logistik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di tahun 2024
8	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	2 laporan	100,00%	Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan prasarana kebutuhan kantor sampai dengan triwulan IV	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan kantor untuk tahun 2024
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan daerah	2 laporan	100,00%	Telah dilaksanakan pemenuhan pembayaran listrik, telepon dan Honor PTT/THL tepat waktu sampai dengan triwulan IV	Melakukan penyelesaian administrasi pembayaran listrik, telepon dan honor PTT/THL lebih awal pada tahun 2024
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	3 laporan	100,00%	Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas gedung, sarana dan prasarana serta kendaraan dinas roda 4 beserta pembayaran pajaknya tepat waktu sampai dengan Triwulan IV	Melakukan identifikasi/pencatatan lebih cermat terhadap fasilitas gedung, sarpras dan kendaraan yang perlu dirawat serta pembayaran pajak tepat waktu untuk tahun 2024
11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	14 dokumen	100,00%	Telah disusunnya dokumen perencanaan tahun 2025 dan evaluasi kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan IV	Melakukan konsolidasi rencana kerja perubahan 2024 dan RKA, DPA dan anggaran kas serta evaluasi pengukuran kinerja sampai dengan triwulan IV

Catatan :

- * Masing-masing realisasi ada analisis ketercapaian (memuat penyebab keberhasilan / kegagalan atau
- ** Solusi yang telah dilakukan
- *** Tulis Periode Pengukuran Kinerja

Banjarnegara, Desember 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara

DARMADI DIMPARDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 199803 1 006

ANALISIS KETERCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJARNEGARA

Triwulan IV

No	Sub Kegiatan	TW IV TH 2024		TW IV TH 2024	
		Target	Realisasi (%)	Analisis Ketercapaian*	Solusi**
1	2	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 unit	100,00%	Tercukupinya kebutuhan Bandwith Internet untuk OPD, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT Pasar	- Peningkatan Kapasitas Bandwith Internet untuk OPD, Kecamatan, Kelurahan, dan UPT Pasar - Perlu adanya penambahan sistem keamanan jaringan internet
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 Dokumen	100,00%	1. Update Database Menara Telekomunikasi 231 menjadi 270 2. Terlaksananya monitoring Menara Telekomunikasi 3. Terbitnya 7 Surat Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi	Pemerataan/ Penyebaran Pembangunan Menara Telekomunikasi dan operator telekomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan blind spot
3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 unit	100,00%	Tersedia aplikasi helpdesk Kominfo	Melakukan pelatihan penggunaan aplikasi
4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 dokumen	100,00%	Tersedianya fasilitas infrastruktur jaringan, data center dan internet untuk OPD dan unit kerja 1. Upgrade System jaringan Setda 2. Upgrade System Keamanan Jaringan	Upgrade sarpras jaringan, data center dan internet
5	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	9 dokumen	100,00%	Tersedianya informasi serta berita pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat melalui Website banjarnegarakab, IG, Twitter, Facebook, Youtube serta Penanganan aduan masyarakat melalui kanal LaporGub, LaporBup, Lapor SP4N, SMS/WA Gate a way	Penyediaan anggaran dan SDM untuk pengelolaan website, IG, FB, Twitter, youtube dan fasilitasi Bimtek penanganan layanan aduan Laporgub, LaporBup, SP4N, sms/wa gate away
6	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	100,00%	Tersedianya informasi pembangunan dan publikasi kegiatan pemerintahan melalui baliho/banner dan kalender. Belum tersedianya informasi publikasi dan publikasi kegiatan pemerintahan melalui majalah derap serayu, video profil wilayah, dan buku kaleidoskop	Penyediaan anggaran yang mencukupi untuk diseminasi informasi pembangunan melalui baliho/nbanner dan kalender pembangunan banjarnegara, dan penyediaan anggaran untuk pembuatan majalah derap serayu, video profile wilayah dan buku kaleidoskop sebagai media informasi pembangunan kabupaten kepada masyarakat

7	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen Program dan Siaran	Melakukan evaluasi keberhasilan program siaran
8	Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	100,00%	Tersedianya DIP, DIK dan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik	Tahun 2025 perlu adanya Monev Keterbukaan Informasi Publik untuk OPD dan pembentukan PPID Desa.
9	Layanan Hubungan Media	3 layanan	100,00%	Tersedianya informasi melalui konferensi/jumpa pers dengan media, iklan, reklame, film, spot feature televisi, spot feature radio, dan liputan kegiatan Pemerintah unsur pimpinan dan OPD	Penyediaan anggaran dan SDM untuk peliputan kegiatan pimpinan, konferensi/jumpa pers dengan media, iklan, reklame, film, spot feature televisi, dan spot feature radio
10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	20 orang	100,00%	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik insan media/pers/wartawan	Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dengan insan media/pers/wartawan
11	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 dokumen	100,00%	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat, media dan kemitraan komunitas melalui sosialisasi tatap muka/bimtek dan lomba	Kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas melalui sosialisasi tatap muka, bimtek, coffee morning, pentas kesenian, lomba, sosialisasi, dan lainnya sebagai media penyampaian informasi yang lebih luas kepada masyarakat
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen	100,00%	Telah tersusunnya Buku Statistik Sektoral OPD	Melakukan evaluasi terkait data statistik sektoral 2024 dan melakukan pemetaan kegiatan statistik sektoral 2025
13	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	100,00%	Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Informasi ke semua OPD Pelaksanaan ITSA 3 (tiga) Aplikasi, Terpenuhi pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik, Launching dan bimtek csirt	Meningkatkan keamanan informasi/siber menggunakan indeks KAMI dan melakukan ITSA/pentest pada aplikasi milik Pemerintah Daerah
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	100,00%	Telah tersusunnya laporan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium Pengelola Keuangan sampai dengan Triwulan IV	Meningkatkan disiplin pegawai dalam penandatanganan dokumen gaji dan tunjangan untuk tahun 2024
15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110 Dokumen	100,00%	Telah menyusun dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan sampai dengan triwulan IV	Melakukan koordinasi dengan pengelola kegiatan pada bidang untuk pelaksanaan tahun 2024
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	100,00%	Telah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan triwulan IV	Menginventarisir kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk tahun 2024
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	100,00%	Telah terpenuhinya bahan logistik kantor sampai dengan triwulan IV	Melakukan inventarisasi kebutuhan logistik di tahun 2024
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	276 dokumen	100,00%	Telah dipenuhinya bahan bacaan/informasi sampai dengan triwulan IV	Menginventarisir kebutuhan bahan bacaan di tahun 2024

19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	100,00%	Telah tersedianya sarana prasarana gedung kantor sampai dengan Triwulan IV berupa : laptop, printer, kamera, PC, dan perlengkapan studio video dan audio	Menginventarisir dan mendata kebutuhan akan sarana dan prasarana pegawai yang sesuai standar kebutuhan pada tahun 2024
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	100,00%	Terbayarnya Listrik dan telepon sampai dengan triwulan IV	Melakukan pembayaran listrik dan telepon tepat waktu pada tahun 2024
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 laporan	100,00%	Terpenuhinya pembayaran gaji PTT (1) dan THL (6) sampai dengan triwulan IV	Meningkatkan koordinasi dengan pegawai PTT/THL terkait pembayaran gaji tiap bulan di tahun 2024
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	100,00%	Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas roda 4 beserta pembayaran pajaknya tepat waktu sampai dengan triwulan IV	Melakukan identifikasi/pencatatan lebih cermat terhadap kendaraan yang perlu dirawat serta pajaknya agar bisa dibayarkan tepat waktu di tahun 2024
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	100,00%	Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas gedung sampai dengan triwulan IV	Melakukan identifikasi/pencatatan lebih cermat terhadap bangunan gedung, agar lebih cepat ditangani untuk fasilitas yang mengalami kerusakan pada tahun 2024
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 unit	100,00%	Telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kantor sampai dengan triwulan IV	Melakukan identifikasi/pencatatan lebih cermat terhadap sararan dan prasarana yang perlu pemeliharaan pada tahun 2024
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100,00%	Telah tersusunnya dokumen perencanaan sampai dengan triwulan IV	Peningkatan koordinasi antara sekretariat selaku pengumpul data dengan bidang-bidang pada penyusunan laporan realisasi kegiatan di tahun 2024, membuat dokumen sesuai dengan hasil penyelarasan dokumen perencanaan.
26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	100,00%	Telah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi laporan kinerja sampai dengan triwulan IV	Peningkatan koordinasi antara sekretariat selaku pengumpul data dengan bidang-bidang pada penyusunan laporan realisasi kegiatan di tahun 2024

- Catatan :**
- * Masing-masing realisasi ada analisis ketercapaian (memuat penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja)
 - ** Solusi yang telah dilakukan
 - *** Tulis Periode Pengkuran Kinerja

Banjarnegara, Desember 2024
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara



SAMIADILJUMALDO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 199803 1 006

RENCANA KERJA TAHUNAN

(RKT)

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. YANI NOMOR 16 Telp. (0286) 591218

BANJARNEGARA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Urusan Komunikasi dan Informatika yang menjadi urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mendasari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, telah dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas tersendiri terpisah dengan Dinas Perhubungan yang pada awalnya tergabung dalam Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari penggabungan Dinkominfo itu sendiri, Bagian Humas Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Statistik dan Persandian. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara sebagai lembaga dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah merencanakan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut merupakan Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai 6 (enam) sasaran. Adapun capaian kinerja dari ke 5(lima) program tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
2.	Peningkatan kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistic sektoral
4.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 pada dasarnya merupakan pedoman bagi seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
 BAB I : PENDAHULUAN	4
A. Tugas dan Peran Organisasi.....	4
B. Keterkaitan RKT dengan Renstra	5
 BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
A. Tujuan Strategis.....	6
B. Sasaran Strategis dan IKU Serta Target Program dan Kegiatan Pokok.....	8
 BAB III : PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN PERAN ORGANISASI

Data Umum

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KETERKAITAN RKT DAN RENSTRA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dalam penyusunannya memperhatikan dokumen – dokumen rencana yang lain baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. KETERKAITAN :

1. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 yang merupakan Penjabaran dari RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026;
2. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 sebagai acuan dalam Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 – 2026;
3. RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2023 – 2026 sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. TUJUAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu Tahun 2023 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahunan.

1. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai dan secara potensial dapat terwujud. Dengan demikian Visi merupakan arah bagi organisasi dalam melakukan kegiatannya.

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Banjarnegara yang informatif dan sejahtera melalui penyelenggaraan Teknologi Komunikasi dan informatika yang efektif, efisien dan berkelanjutan”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara mempunyai Misi sebagai berikut :

- a. Menciptakan SDM yang berkompeten, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menciptakan komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
- c. Mewujudkan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika yang efektif dan handal dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.

- d. Mewujudkan pengelolaan data center yang sinergis, efektif informatif dan berkelanjutan dalam rangka, meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap informasi.
- e. Mewujudkan pelayanan online dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis TI dan Komunikasi.
- f. Mengoptimalkan terdistribusinya informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, dan program sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1	2	3	4
1	Digitalisasi Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Meningkatnya Keamanan Informasi dalam mendukung SPBE	4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU SERTA TARGET PROGRAM KEGIATAN POKOK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan target kinerja tahunan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada awal Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 061/709 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Satuan Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Digitalisasi Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara		
1. Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	1. Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	2 sistem
	2. Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	195 dokumen
	3. Jumlah dokumen hasil sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen
	4. Jumlah aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	1 aplikasi
	5. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	3 dokumen
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 dokumen
	2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen
	3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen
	4. Jumlah dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen
	5. Jumlah Layanan Hubungan Media	6 layanan
	6. Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	160 orang
	7. Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan komunitas dalam Mendisemiknasikan Informasi	3 dokumen

	Program atau Kebijakan	
Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen
	2. Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	44 dokumen
	3. Jumlah Infrastruktur Statistik	1 paket
	4. Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	44 orang
Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan
	2. Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 OPD
Meningkatnya kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang
	2. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110 dokumen
	3. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3 paket
	4. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
	5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	276 dokumen
	6. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket
	7. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit
	8. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	9. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan
	10. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit
	11. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

	12. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
	2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen

PROGRAM KEGIATAN POKOK

Saturan Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Tahun Anggaran : 2024

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.314.187.000	
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.078.000.000	
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 2.375.455.500	
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 359.000.000	
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 246.357.500	

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengimplementasikan sasaran, program dan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika guna mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan.

Sebagai suatu pedoman perencanaan, maka hal ini yang paling mendasar dari keberhasilan setiap program dan kegiatan yang direncanakan adalah terletak bagaimana semua hal yang telah direncanakan tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing Bidang, seksi maupun Sub Bagian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 masing-masing Bidang, Seksi maupun Sub Bagian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara semaksimal mungkin dapat melaksanakan secara konsisten semua program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Secara Teknis Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam program kerja masing-masing Bidang, Seksi maupun Sub Bagian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, Februari 2023

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA**



R. RIONO RAHADI PRASETYO, S.H., M.H

NIP. 19640217 198607 1 001